

LAPORAN KINERJA 2023

Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar



 Jl. Malino No.KM 18, Borongloe, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92172

 0811-4112-323

 upt_makassar@postel.co.id

 [balmon_makassar](#)

 [balmon_makassar](#)

 [@balmon.makassar](#)

 [BalmonMakassar](#)



DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA 2023

**Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar**

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Pencapaian PK UPT

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) meliputi urusan tata usaha dan kerumahtanggaan termasuk penyusunan rencana dan program, kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, pengukuran stasiun radio, pemantauan atau monitoring dan penertiban frekuensi radio, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, verifikasi dan validasi data pengguna frekuensi radio, evaluasi dan pengujian ilmiah, pelayanan pengaduan masyarakat, serta penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 adalah realisasi program kerja yang berhasil dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 yang tercermin dalam laporan akuntabilitas keuangan dan laporan capaian kinerja tahun anggaran 2023.

Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar 99,51% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.689.528.000,-. Hal ini menunjukkan indikator keseluruhan program kerja berhasil terlaksana dengan baik.

Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%
		2. Pemeriksaan (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
		3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%
		4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%
		5. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	95%	99,47%
		6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	210%
		7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	303%
		8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%
		9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	283%
		10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%	356%
		11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	87	89,19
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80%	100%

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Berikut penjelasan singkat mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar untuk tahun anggaran 2023.

Pada Sasaran Kinerja 1 **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** terdapat 11 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja.

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan kegiatan pemantauan frekuensi radio yang harus memenuhi 3 unsur, okupansi 18 pita yang diperoleh dari ROL dan SMSN, 90% Identifikasi hasil monitor, 70% ISR termonitor.

Capaian indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun anggaran 2023 sebesar 100% atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% pemeriksaan stasiun radio sampling ISR yang diperiksa (inspeksi). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan pemeriksaan stasiun radio yang terdiri dari pemeriksaan microwave link melalui remote site (akses NOC dan/atau NMS), inspeksi open shelter serta pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital dan melakukan monitoring perangkat telekomunikasi.

Capaian indikator Pemeriksaan Stasiun Radio yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun anggaran 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 99% jumlah aduan gangguan yang tertangani. Capaian Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada akhir tahun anggaran 2023 sebesar 100%. Sepanjang tahun 2023 sebanyak 20 aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang masuk telah terselesaikan.

Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 93% jumlah penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan penertiban SFR dengan indikator jumlah illegal menjadi off air serta capaian penertiban perangkat.

Capaian indikator Penertiban Spektrum Frekuensi Rdaio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun anggaran 2023 sebesar 100% atau sebesar 107,52% dari target yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI.

Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 95% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 99,47% dari target sebesar 95%, dengan persentase capaian sebesar 104,70%.

Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT untuk tahun anggaran

2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 210% dari target sebesar 95%, dengan persentase capaian sebesar 210%.

Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 303% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 303%.

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% Bimbingan Teknis SRC/LRC untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 283% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 283%.

Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 356% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 356%.

Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Pada Sasaran Kinerja 2 “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**” terdapat 2 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian indikator kinerja tersebut.

Nilai Kinerja Anggaran SDPPI

Penyempurnaan kualitas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dengan diimplementasikannya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mulai dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan nilai IKPA sebesar 87 untuk tahun anggaran 2023 yang diperoleh dari nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% dan nilai kinerja SMART dengan bobot sebesar 60%. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 89,19 pada akhir tahun anggaran 2022 atau sebesar 102,50% dari target yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI yaitu sebesar 87. Pembobotan IKPA berdasarkan Kementerian Keuangan antara lain kualitas pelaksanaan anggaran yang meliputi revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran yang meliputi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang meliputi capaian output.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 80% untuk indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pertanggungjawaban APBN dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full module. Seluruh proses perekaman tagihan/transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilaksanakan melalui SAKTI yang terkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sehingga

memudahkan proses pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan sistem single database pada SAKTI, proses penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai Kementerian Negara/Lembaga akan menjadi lebih mudah dan terjaga validitasnya.

B. Pencapaian Penertiban Nasional Untuk Pengguna Frekuensi Radio

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara, sehingga pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dalam pemanfaatannya perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan dan kerugian dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan penyelenggaraan telekomunikasi, serta penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal maka operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dipandang perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh UPT Monitor di daerah guna memberikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi secara umum.

Kegiatan penertiban dilakukan sebagai amanat UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Disamping itu, kegiatan penertiban ini terkait dengan Hukum Acara Pidana sehingga dilakukan berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan penertiban serentak sebagai suatu rangkaian dari proses manajemen spektrum maupun alat perangkat telekomunikasi.

Pelaksanaan Pekan Tertib Frekuensi 2023 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan frekuensi radio secara legal. Kegiatan penertiban serentak secara nasional ini menargetkan jumlah gangguan spektrum frekuensi radio berkurang sebagai akibat dari pengguna yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi radio dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis.

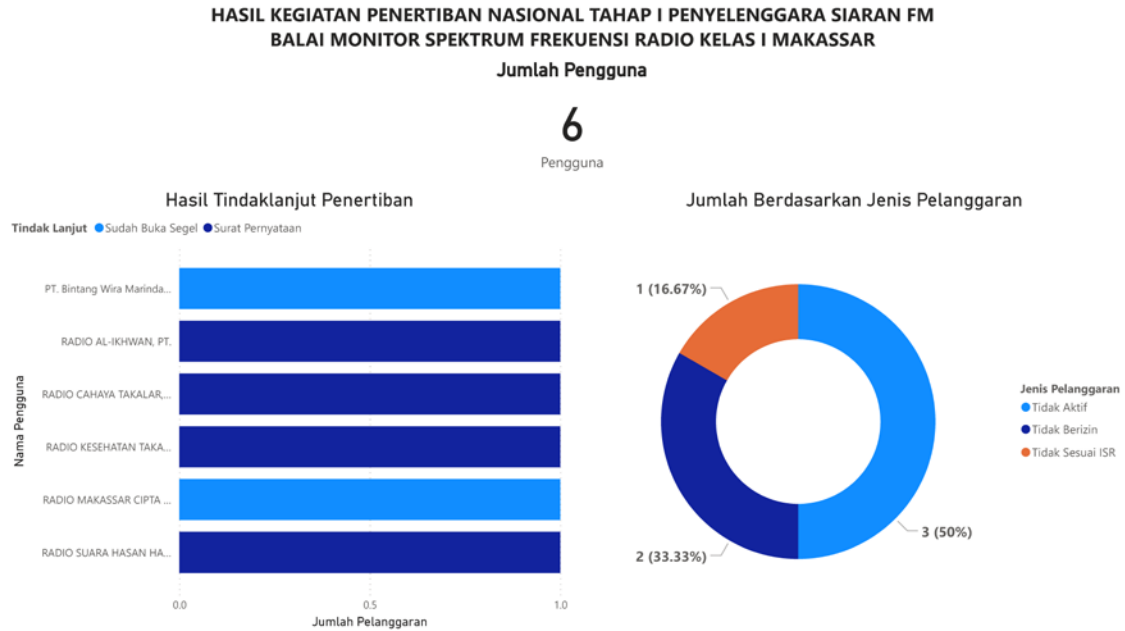
Penertiban serentak secara nasional ini menasar 4 (empat) kelompok pengguna frekuensi, yaitu (1) pengguna frekuensi yang tidak dilengkapi dengan data perizinan, (2) pengguna frekuensi yang beroperasi tidak sesuai dengan peruntukannya, (3) pengguna frekuensi yang berpotensi menimbulkan gangguan atau membahayakan keselamatan penerbangan serta (4) alat dan/atau perangkat yang tidak tersertifikasi. Oleh karena itu, objek penertiban mencakup Dinas Tetap (Microwave Link dan Broadband Wireless Access/BWA), Dinas Amatir, Dinas Maritim dan Dinas Bergerak Darat serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak tersertifikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan kegiatan penertiban nasional pada 8 (delapan) kabupaten/kota wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pekan Tertib Frekuensi Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berhasil melakukan klarifikasi dan penghentian 105 pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal.

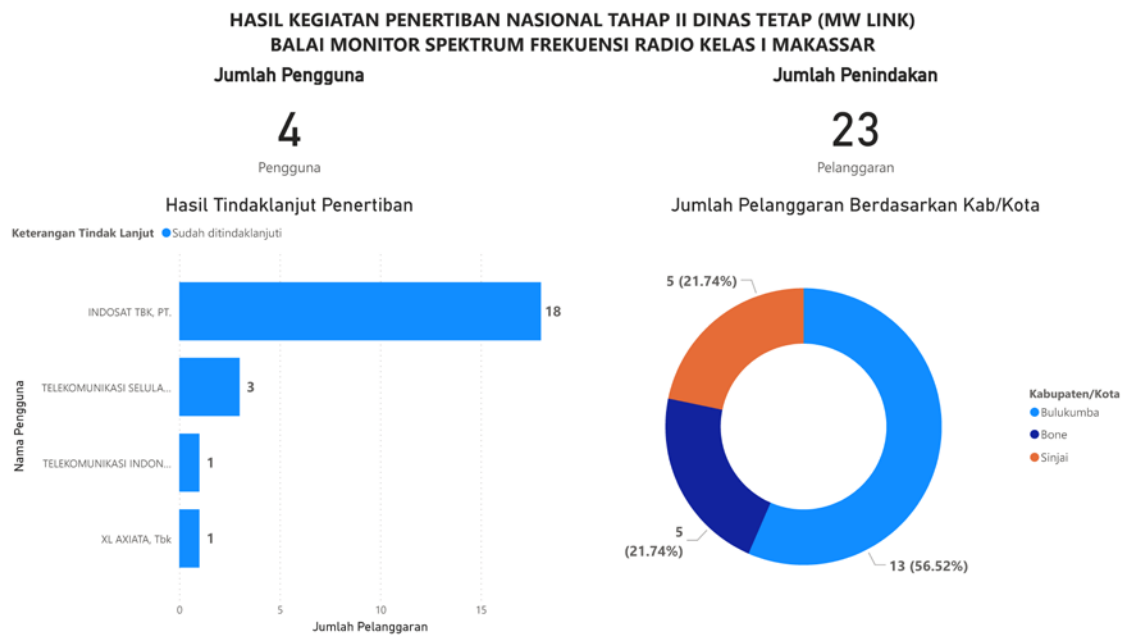
Berikut ini daftar pengguna frekuensi ilegal yang diperoleh selama kegiatan Penertiban Nasional:

Penertiban Nasional I Penyelenggara Radio Siaran FM



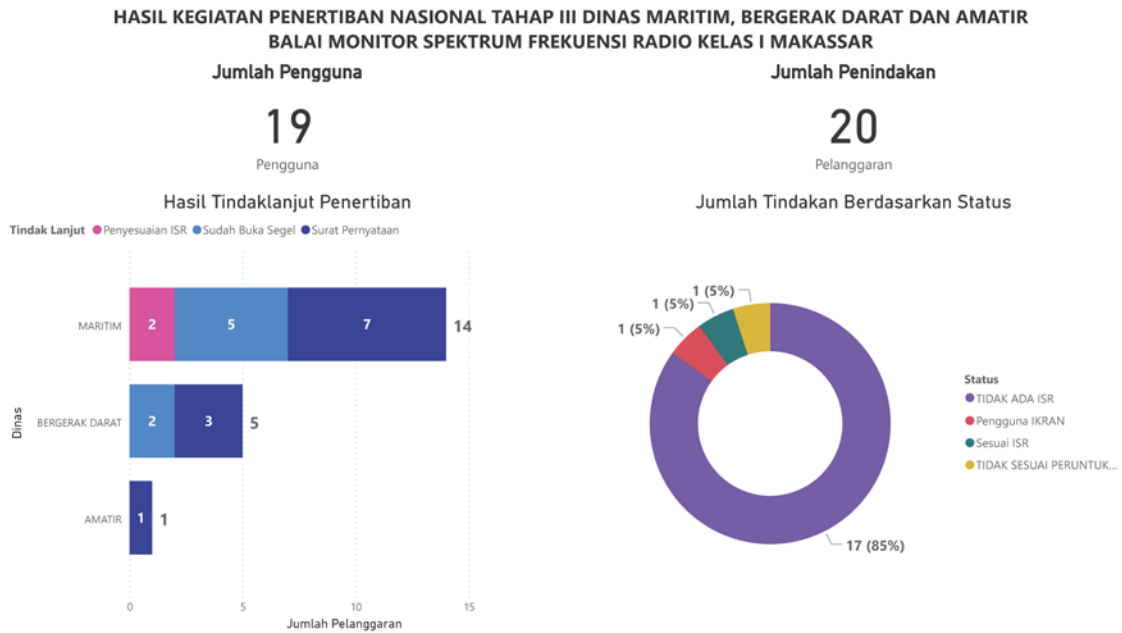
Gambar 1. Hasil Penertiban Nasional Tahap I

Penertiban Nasional II Dinas Tetap (MW Link)



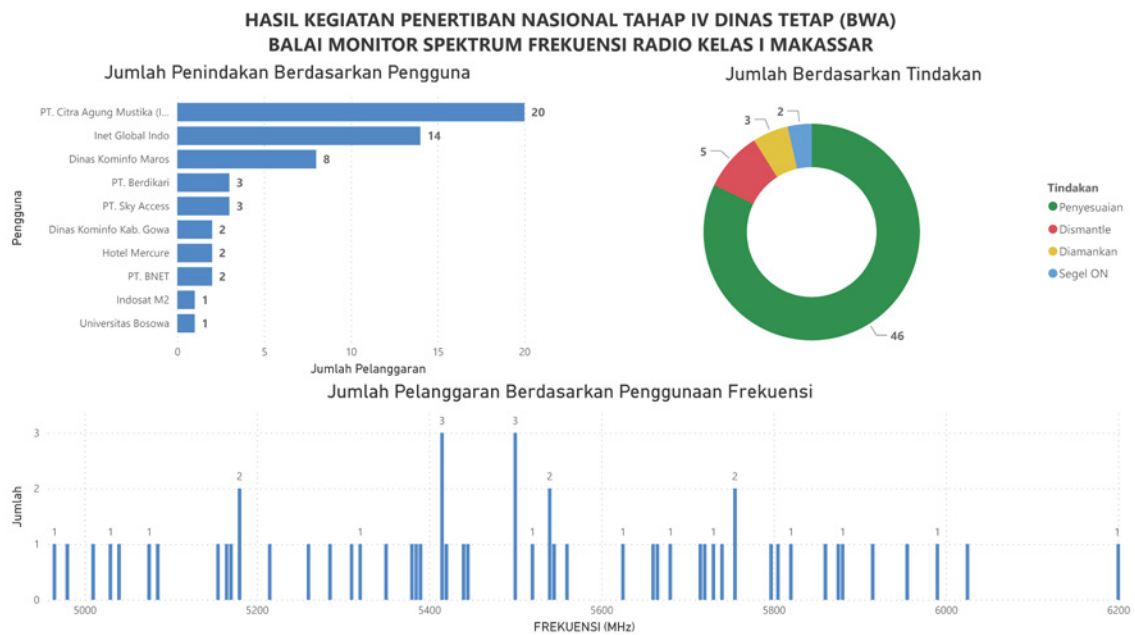
Gambar 2. Hasil Penertiban Nasional Tahap II

Penertiban Nasional III Dinas Maritim, Bergerak Darat dan Amatir



Gambar 3. Hasil Penertiban Nasional Tahap III

Penertiban Nasional IV Dinas Tetap BWA



Gambar 4. Hasil Penertiban Nasional Tahap IV

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat diselesaikan dan dipaparkan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran di tahun 2023 kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

LAKIN ini merupakan media pelaporan kinerja instansi yang diukur dari pencapaian target kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan melihat hasil pelaksanaannya selama tahun 2023 yang berkaitan dengan aspek keuangan, kepegawaian, peningkatan SDM, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan perangkat monitoring sistem, penegakan hukum dan pelayanan publik serta ketatausahaan yang implementasinya dirinci pada Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengukur kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2023 dengan mengkomparasikan antara tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar



selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI dengan target kinerja hasil pelaksanaan selama tahun 2023, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023. Kami menyadari bahwa hasil yang diinformasikan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun guna mewujudkan laporan yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang terlibat maupun yang mendukung penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023 ini, semoga Allah SWT menilainya sebagai amal ibadah, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh..

Kab. Gowa, Januari 2024
Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar


Heriyanto
Heriyanto



Ringkasan Eksekutif

- A. Pencapaian PK UPT ii
- B. Pencapaian Penertiban Nasional Untuk Pengguna Frekuensi Radio v

Kata Pengantar viii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 2
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
- C. Potensi dan Permasalahan Strategis 5
- D. Sistematika Pelaporan 6

BAB II PERJANJIAN KINERJA

- A. Sasaran Program 10
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi 16
 - Sasaran 1 Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi 16
 - 1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota 16
 - 2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio 17
 - 3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 21
 - 4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi 22
 - 5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT 24
 - 6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT 25
 - 7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan KPKNL 26
 - 8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat 28
 - 9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC 28
 - 10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN 29
 - 11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) 30
 - Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien 31
 - 1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI 31
 - Pengelolaan Anggaran 34
 - 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 38
 - Aset 38
 - Kegiatan Umum Lainnya 39
 - A. Pengadaan Barang dan Jasa 39
 - C. Pemusnahan Barang Bukti 40
 - D. Kepegawaian dan Umum 41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 46

Lampiran 51

Tabel 1	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	ii
Tabel 2.1	Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	16
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota 5 Tahun Terakhir	16
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Tahun Anggaran 2023	17
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) 5 tahun terakhir	18
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Anggaran 2023	21
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 5 Tahun Terakhir	21
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun Anggaran 2023	22
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indikator Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi 5 Tahun Terakhir	22
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT Tahun 2023	24
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT 5 Tahun Terakhir	24
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Persentase Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT Tahun 2023	25
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT di UPT 5 Tahun Terakhir	25
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan KPKNL Tahun 2023	26
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	28
Tabel 3.15	Capaian Indikator Persentase Bimbingan Teknis SRC/LRC Tahun 2023	28
Tabel 3.16	Capaian Indikator Persentase ISR Maritim Program MOTS-IKRAN Tahun 2023	29
Tabel 3.17	Persentase Verifikasi Data Koordinat Siter ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	30
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	32
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI 5 Tahun Terakhir	32
Tabel 3.20	Nilai Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	32
Tabel 3.21	Nilai Capaian Kinerja SMART Tahun 2023	33
Tabel 3.22	Pagu Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2023	34
Tabel 3.23	Revisi Anggaran Tahun 2023	35
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023	36
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019 – 2023	36
Tabel 3.26	Neraca Per 31 Desember 2023	38
Tabel 3.27	Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	40
Tabel 3.28	Daftar/Alat Perangkat Telekomunikasi yang Dimusnahkan	41
Tabel 3.29	Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023	41

Gambar 1	Hasil Penertiban Nasional Tahap I	vi
Gambar 2	Hasil Penertiban Nasional Tahap II	vi
Gambar 3	Hasil Penertiban Nasional Tahap III	vii
Gambar 4	Hasil Penertiban Nasional Tahap IV	vii
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Ditjen SDPPI	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar	5
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Gambar 3.1	Data Hasil Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio Balmon Makassar Tahun 2023	17
Gambar 3.2.	Data Hasil Kegiatan Inspeksi Validasi Stasiun Radio MW Link	18
Gambar 3.3.	Data Hasil Kegiatan Pengukuran Radio FM dan TV Digital	19
Gambar 3.4.	Data Hasil Kegiatan Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi	20
Gambar 3.5.	Data Hasil Kegiatan Penanganan Gangguan	21
Gambar 3.6.	Data Hasil Kegiatan Penertiban Tahun 2023	23
Gambar 3.7.	Capaian SLA Perangkat SMFR Tahun 2023	24
Gambar 3.8.	Capaian Kegiatan UNAR Tahun 2023	26
Gambar 3.9.	Capaian Penanganan Piutang Tahun 2023	27
Gambar 3.10.	Capaian Pelimpahan KPKNL Tahun 2023	27
Gambar 3.11.	Capaian Pelimpahan KPKNL Tahun 2023	28
Gambar 3.12.	Capaian Bimtek SOR SRC/LRC Tahun 2023	29
Gambar 3.13.	Capaian MOTS Tahun 2023	30
Gambar 3.14.	Capaian Prima Aksi Tahun 2023	31
Gambar 3.15.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	33
Gambar 3.16	Komposisi Pagu Anggaran Per Komponen Tahun 2023	35
Gambar 3.17.	Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	36
Gambar 3.18.	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023	37
Gambar 3.19.	Grafik Disbursement Plan Tahun 2023	37
Gambar 3.20.	Grafik Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2023	42
Gambar 3.21.	Grafik Rekapitulasi Surat Keluar Tahun 2023	42








BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Potensi dan Permasalahan Strategis
Sistematika Pelaporan



A. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang monitoring frekuensi radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020-2024. Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap Akhir adalah "terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis".

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, program pembangunan infrastruktur RPJMN 2020-2024 diarahkan pada tiga pilar, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar;
2. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi; dan
3. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan.

Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Ditjen SDPPI dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance*.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal SDPPI, pembinaan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Ditjen SDPPI dan pembinaan teknis operasional di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Ditjen SDPPI dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai alat untuk mendapatkan masukan dari para stakeholders demi perbaikan kinerja Ditjen SDPPI dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Lebih rinci tugas pokok setiap seksi, antara lain:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
2. Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
3. Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika.
4. Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

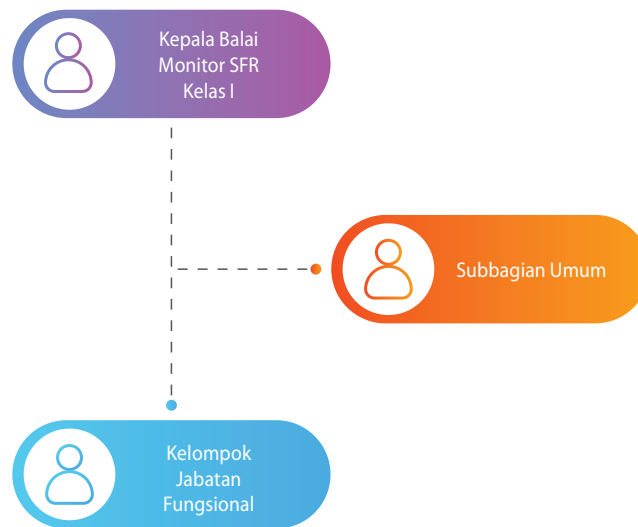
1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; dan
10. Pelaksanaan Maritim On The Spot.

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan Sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Ditjen SDPPI
Sumber : www.postel.go.id



Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

C. Potensi dan Permasalahan Strategis

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan yang memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Adanya transformasi digital dan layanan broadband terutama wireless broadband akan menyebabkan terjadinya ledakan kebutuhan bandwidth yang berdampak pada kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar, kinerja industri, kebutuhan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan ekosistem industri secara menyeluruh.

Perkembangan Teknologi dan layanan TIK yang pesat telah berdampak pada perubahan industri TIK secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya transformasi perubahan industri yang mengarah pada digitalisasi industri. Transformasi perubahan industri tersebut didorong oleh adanya inovasi dan kreativitas industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penciptaan layanan TIK yang bervariasi sesuai kebutuhan pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat SMFR pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar perlu ditingkatkan atau di upgrade yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
2. Penguatan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (capacity building) di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya informasi mengenai proses perizinan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga perlu ditingkatkan serta diperbaharui sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Gangguan interferensi frekuensi radio yang masih sering terjadi.



D. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2023.
3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
4. Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.





2023.12.29 11:29

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Program
Perjanjian Kinerja Tahun 2023



A. Sasaran Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara - negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya sasaran program 2020 – 2024 yang disusun oleh Ditjen SDPPI, yaitu:

- SP.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN Ditjen SDPPI
- SP.2 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio
- SP.3 Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
- SP.4 Meningkatkan pengembangan ekosistem industri perangkat TIK
- SP.5 Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2023

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA (SDPPI)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar , Saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
2. Bersedia dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%
		4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%
		6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		7. Persentase (%) Penanganan Putang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKIL	100%
		8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%
		9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
		10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%
		11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyerahan (QR Code Site)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Dijen SDPPI Tahun 2023	87

Kegiatan		Anggaran	
1.	Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp.	9.527.385.000,-
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	13.213.655.000,-
Total Anggaran		Rp.	22.741.040.000,-

Pejabat Penilai
Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,
Ismail Digitally signed
by Ismail
Ismail

Jakarta, 12 Mei 2023
Pejabat yang Dinilai
Kepala Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar,



Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2023

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
(SDPPI)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KESANGGUPAN


Dalam melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Monitor SFR Kelas I Makassar, Saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
2. Bersedia dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penerbitan serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%
		4. Persentase (%) Penerbitan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%
		6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%
		8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%
		9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
		10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%
		11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penylaran (QR Code Site)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80

Kegiatan		Anggaran	
1.	Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp.	9.527.385.000,-
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	12.860.823.000,-
Total Anggaran		Rp.	22.408.208.000,-

Pejabat Penilai
Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,

Digitally signed
by Ismail
Ismail

Jakarta, Agustus 2023
Pejabat yang Dinilai
Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas I Makassar,

Abdul Madjid Hasanuddin

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja disusun untuk menciptakan tolak ukur penilaian atas kinerja UPT sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Persentase
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101,01%
		4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107,52%
		5. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	95%	99,47%	104,70%
		6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	210%	210%
		7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	303%	303%
		8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
		9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	283%	283%
		10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN	100%	356%	356%
		11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	87	89,19	102,5%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80%	80%	100%

Tabel 2.1 Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.22.689.528.000,- (Dua Puluhan Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluhan Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluhan Delapan Ribu Rupiah) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Program
Perjanjian Kinerja Tahun 2023



A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota terlaksana sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%

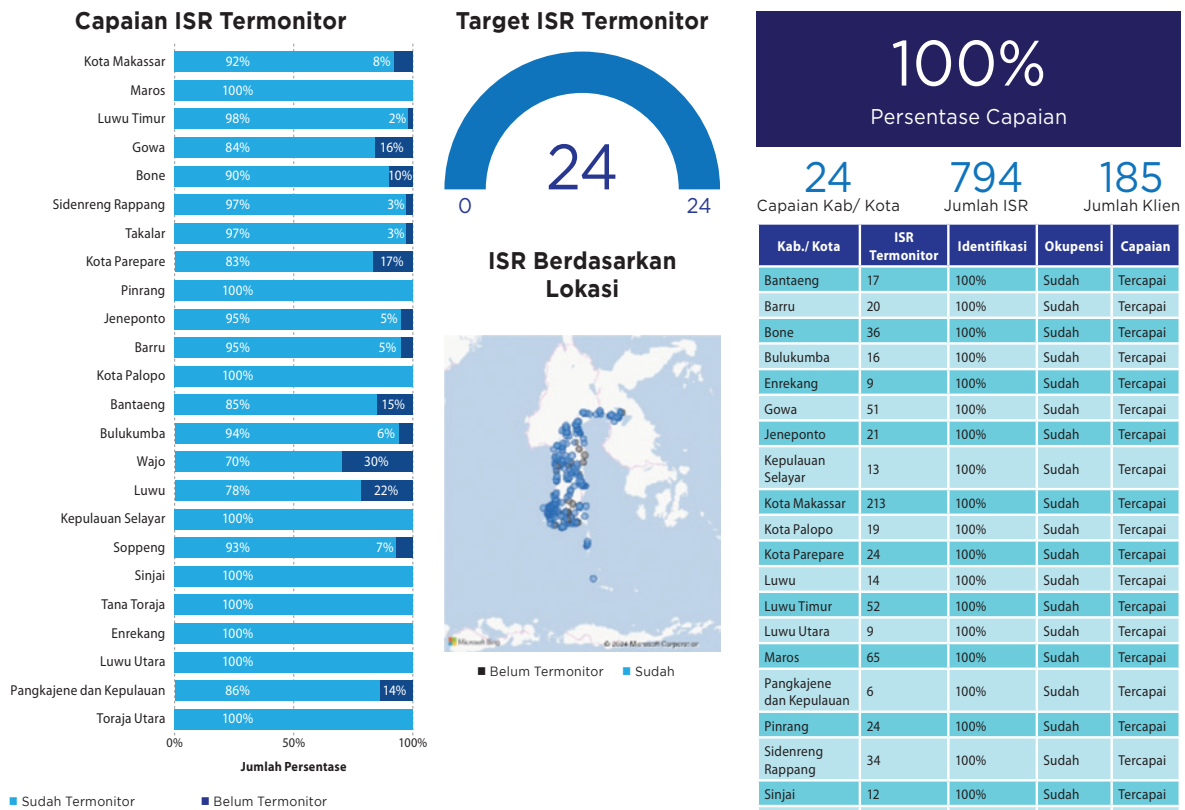
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	2019	80	100
	2020	80	100
	2021	80	91.67
	2022	80	95.83
	2023	100	100

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota 5 Tahun Terakhir



Data Capaian Hasil Kegiatan Monitoring Balmon Makassar Tahun 2023



Gambar 3.1 Data Hasil Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio Balmon Makassar Tahun 2023

Berdasarkan data capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio Tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian ini mencakup observasi penggunaan frekuensi radio sesuai dengan pita penugasan, hasil monitor teridentifikasi, target ISR termonitor dan drive test yang bersifat opsional.

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio terlaksana sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Indikator Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	2019	35	82.65
	2020	35	93.06
	2021	50	82.82
	2022	100	100
	2023	100	100

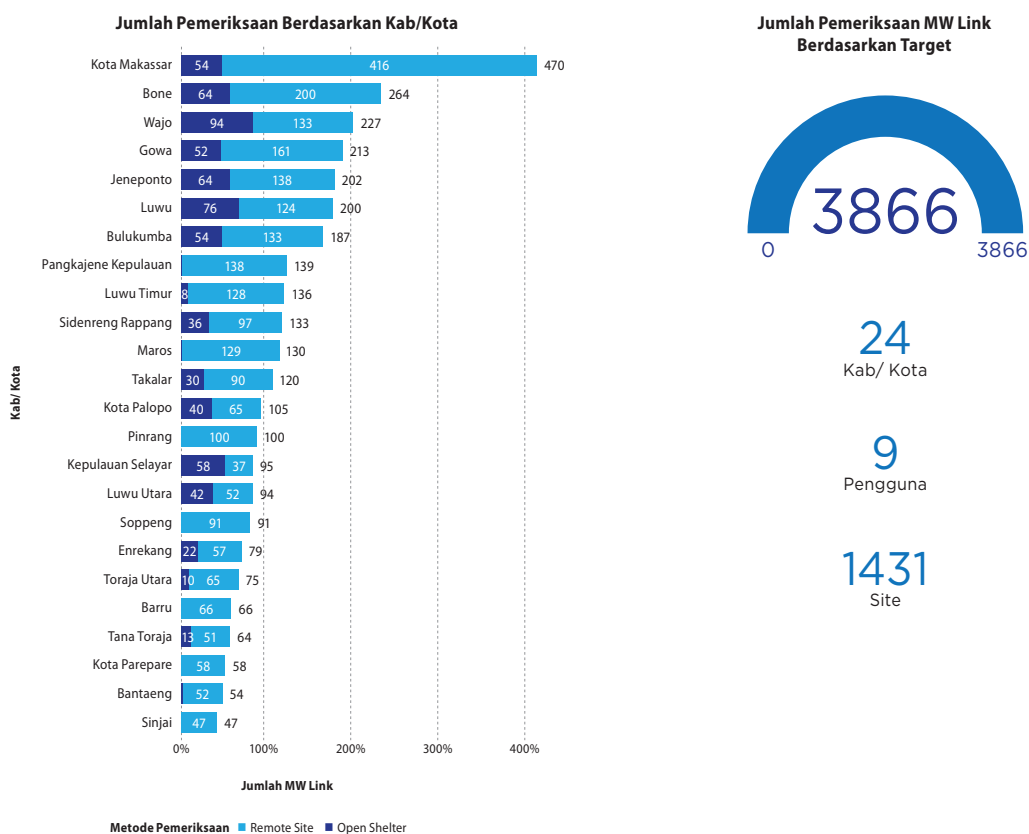
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) 5 tahun terakhir

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran penggunaan frekuensi radio oleh Dinas Tetap (Microwave Link) dan Dinas Siaran (FM dan TV Digital) terhadap kesesuaian penggunaan frekuensi radio serta parameter teknis stasiun radio serta Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio, terdiri dari kegiatan inspeksi validasi data ISR MW Link baik secara *Remote Site* dan *On Site*, pengukuran stasiun radio siaran FM dan TV Digital serta Monitoring Alat/ Perangkat Telekomunikasi.

Adapun untuk masing-masing kegiatan telah memenuhi target yang ditentukan dengan capaian pemeriksaan stasiun radio adalah 100% dengan capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Validasi Data ISR MW Link

Data Hasil Kegiatan Inspeksi Validasi Balmon Makassar



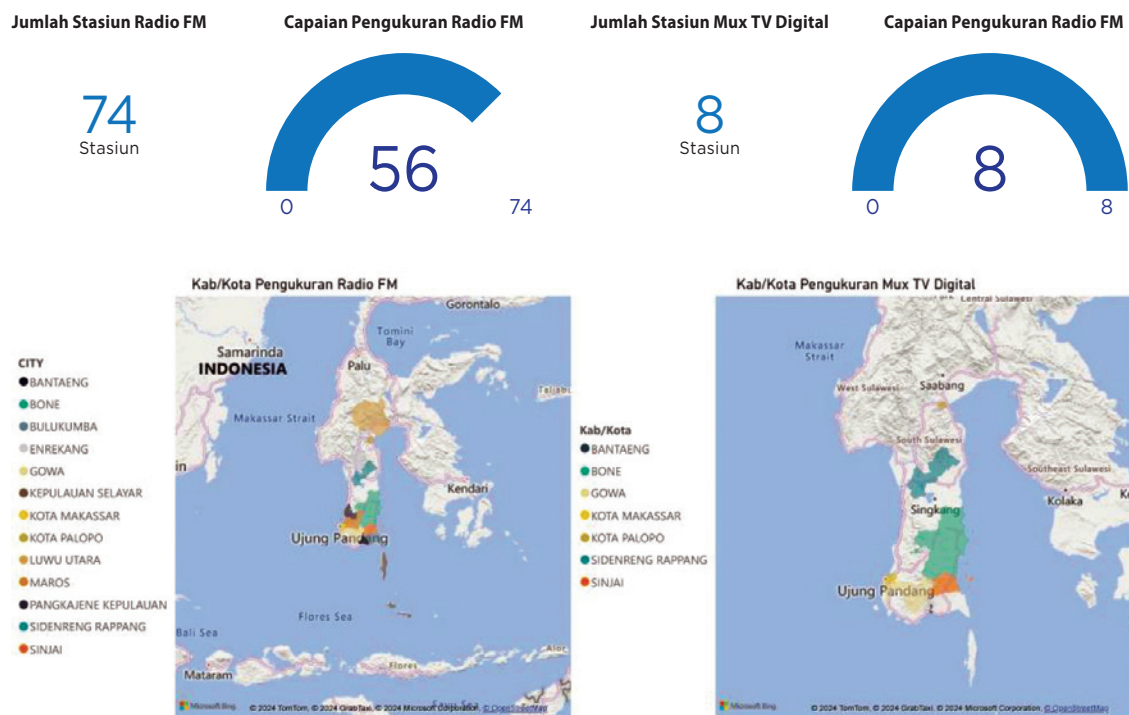
Gambar 3.2. Data Hasil Kegiatan Inspeksi Validasi Stasiun Radio MW Link

Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link dilaksanakan terhadap pengguna Dinas Tetap yang menggunakan frekuensi radio untuk memvalidasi penggunaan Microwave Link sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan. Pemeriksaan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Remote Site yang merupakan pengecekan secara remote penggunaan Microwave Link pada masing-masing NOC penyelenggara jaringan telekomunikasi dan Open Shelter yang merupakan pengecekan penggunaan Microwave Link secara langsung di lokasi stasiun radio setelah pelaksanaan Remote Site. Adapun parameter teknis yang diperiksa yaitu frekuensi, bandwidth, perangkat yang digunakan dan lokasi stasiun radio.

Dari hasil pemeriksaan stasiun radio Microwave Link dengan target sebanyak 3866 ISR telah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan dengan jumlah pengguna sebanyak 9 penyelenggara jaringan telekomunikasi pada 1431 stasiun yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga capaian untuk Validasi Data ISR MW Link adalah sebesar 100%.

b. Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM dan TV Digital

Data Hasil Kegiatan Pengukuran Radio FM dan Digital Balom Makassar



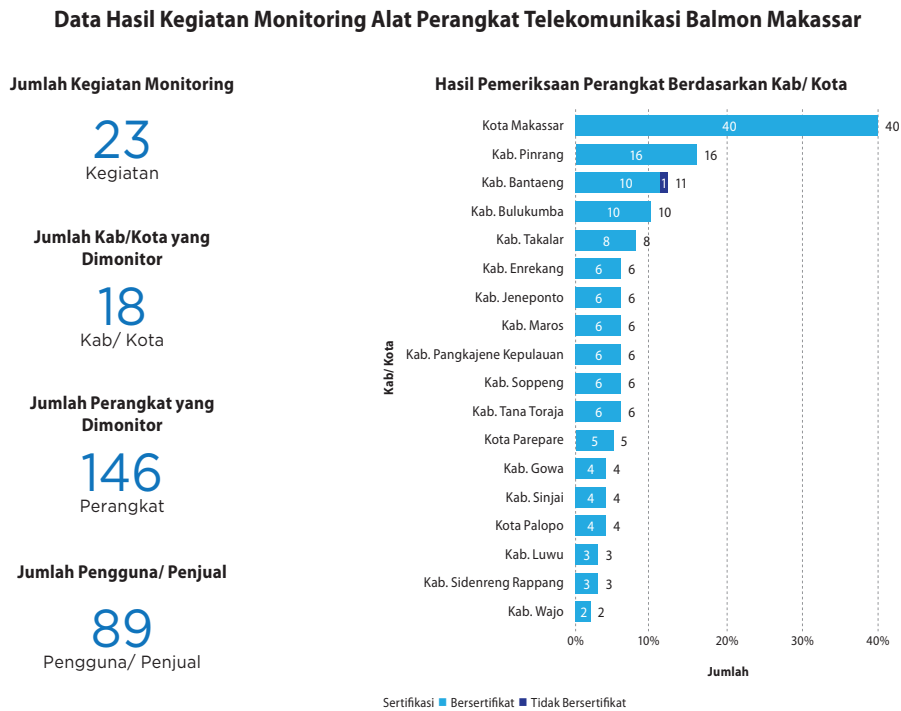
Gambar 3.3. Data Hasil Kegiatan Pengukuran Radio FM dan TV Digital

Pemeriksaan Stasiun Radio Siaran dilaksanakan terhadap pengguna Dinas Siaran berupa penyelenggara radio FM dan penyelenggara Multiplexing TV Digital yang menggunakan frekuensi radio untuk memvalidasi penggunaan Dinas Siaran sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengukuran pancaran penggunaan frekuensi radio pada lokasi stasiun radio untuk mengetahui kesesuaian parameter teknis yang digunakan dan perangkat yang digunakan.

Dari hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada penyelenggara radio FM telah dilaksanakan pengukuran sebanyak 56 stasiun radio dari 74 stasiun radio yang ada sehingga capaian untuk pengukuran penyelenggara

radio FM sebesar 75,67% dari target sebesar 50% stasiun penyelenggara radio FM terukur. Sedangkan untuk penyelenggara Multiplexing TV Digital telah dilaksanakan pengukuran terhadap 8 stasiun radio dengan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi



Gambar 3.4. Data Hasil Kegiatan Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi

Dalam rangka pengawasan Alat Perangkat Telekomunikasi yang beredar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi untuk memastikan setiap perangkat yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan memiliki sertifikasi dan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Dari hasil capaian monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi yang dilaksanakan selama tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 23 kegiatan pada 18 Kabupaten/Kota dengan jumlah perangkat yang dimonitoring sebanyak 146 perangkat pada 89 pengguna/penjual. Sehingga dari target yang ditetapkan dengan minimal 7 kegiatan pada Kabupaten/Kota dengan minimum 3 jenis perangkat prioritas yang telah ditetapkan telah terpenuhi dengan nilai capaian sebesar 100%.

3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101%

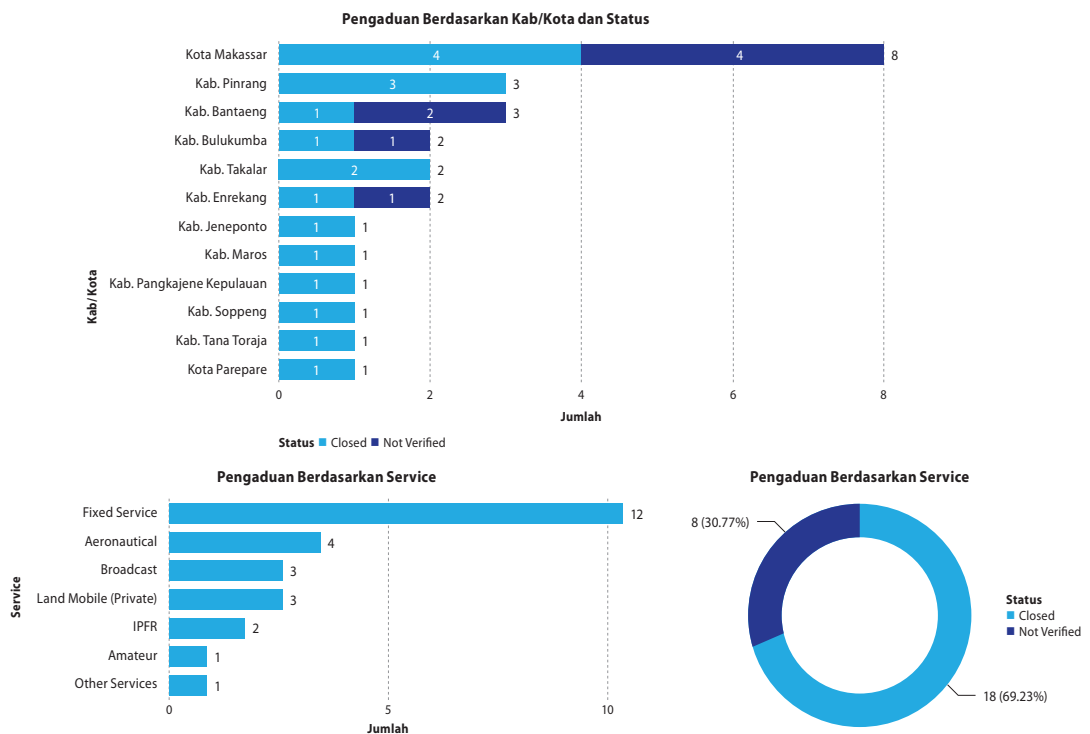
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	2019	95	100
	2020	100	100
	2021	97	100
	2022	98	100
	2023	99	100

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 5 Tahun Terakhir

Penggunaan spektrum frekuensi radio harus digunakan sesuai dengan izin dan peruntukannya serta sesuai dengan parameter teknis yang ditentukan sehingga tidak menimbulkan adanya gangguan yang merugikan (harmful interference) kepada sesama pengguna frekuensi radio. Oleh karena itu dalam hal terjadi gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar akan melakukan penanganan gangguan frekuensi radio untuk menemukan sumber gangguan dan menghentikan pancaran penggunaan yang mengganggu agar tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang aman dan komunikasi berjalan lancar.

Data Hasil Kegiatan Penanganan Gangguan Balmon Makassar



Gambar 3.5. Data Hasil Kegiatan Penanganan Gangguan

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk penanganan gangguan frekuensi radio adalah sebesar 99% laporan pengaduan gangguan tertangani, dimana selama tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melakukan penanganan gangguan sebanyak 18 kegiatan dari 18 pengaduan yang terverifikasi dengan total jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 26 laporan yang masuk dengan capaian sebesar 100%. Dari hasil kegiatan penanganan gangguan yang dilaksanakan meliputi Dinas Tetap, Dinas Penerbangan, Dinas Siaran, Dinas Bergerak Darat, Izin Pita Frekuensi Radio, Amatir dan Dinas Lainnya.

4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Indikator kinerja penertiban spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat terlaksana sebesar 100% dari target sebesar 93% dengan persentase capaian sebesar 107,52%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.52%

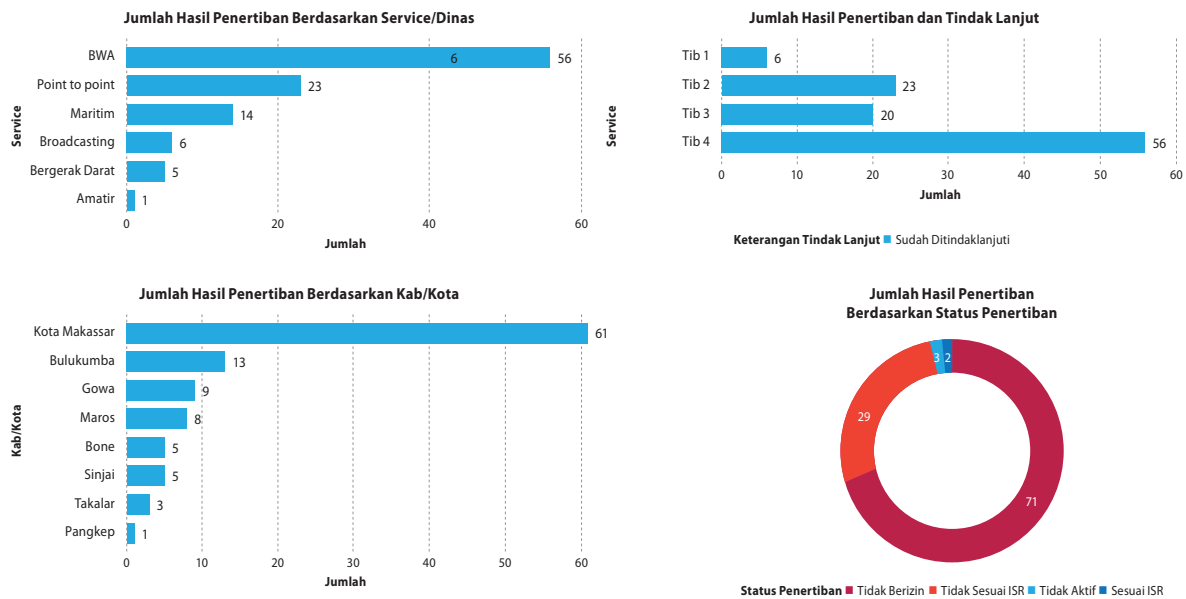
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	2019	80	96.94
	2020	50	74.13
	2021	70	77.14
	2022	90	95.50
	2023	93	100

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Indikator Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi 5 Tahun Terakhir

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara, sehingga pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dalam pemanfaatannya perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan dan kerugian dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan penyelenggaraan telekomunikasi, serta penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal maka operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dipandang perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh UPT Monitor di daerah guna memberikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi secara umum. Kegiatan penertiban dilakukan sebagai amanat UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Perdirjen SDPPI No. 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Disamping itu, kegiatan penertiban ini terkait dengan Hukum Acara Pidana sehingga dilakukan berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Data Hasil Kegiatan Penertiban Balmon Makassar



Gambar 3.6. Data Hasil Kegiatan Penertiban Tahun 2023

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan penertiban serentak sebagai suatu rangkaian dari proses manajemen spektrum maupun alat perangkat telekomunikasi. Pelaksanaan Pekan Tertib Frekuensi 2023 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan frekuensi radio secara legal. Kegiatan penertiban serentak secara nasional ini menargetkan jumlah gangguan spektrum frekuensi radio berkurang sebagai akibat dari pengguna yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi radio dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Penertiban serentak secara nasional ini menyoar 4 (empat) kelompok pengguna frekuensi, yaitu (1) pengguna frekuensi yang tidak dilengkapi dengan data perizinan, (2) pengguna frekuensi yang beroperasi tidak sesuai dengan peruntukannya, (3) pengguna frekuensi yang berpotensi menimbulkan gangguan atau membahayakan keselamatan penerbangan serta (4) alat dan/atau perangkat yang tidak tersertifikasi. Oleh karena itu, objek penertiban mencakup Dinas Tetap (Microwave Link dan Broadband Wireless Access/BWA), Dinas Amatir, Dinas Maritim dan Dinas Bergerak Darat serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak tersertifikasi. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan kegiatan penertiban nasional pada 8 (delapan) kabupaten/kota wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Pekan Tertib Frekuensi Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berhasil melakukan klarifikasi dan penghentian pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal dan perangkat tidak bersertifikat yang diamankan.

5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%	99.47%	104.7%

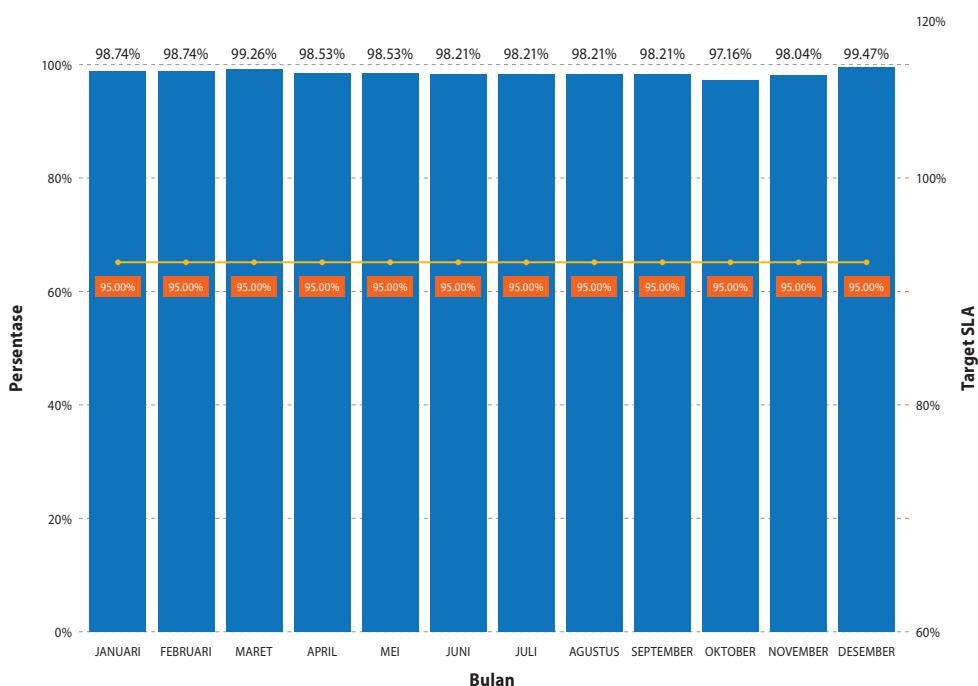
Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	2019	-	-
	2020	83	91.50
	2021	85	91.89
	2022	95	97.55
	2023	95	99.47

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT 5 Tahun Terakhir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar didukung dengan Sistem Monitoring Frekuensi Radio yang terdiri dari Stasiun Monitoring Tetap, Stasiun Monitoring Transportable dan Stasiun Monitoring Bergerak serta Perangkat Monitoring Jinjing. Untuk memastikan peralatan yang dimiliki oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat berfungsi secara maksimal, maka secara rutin dilaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat monitoring serta peralatan pendukungnya.

Capaian SLA Perangkat SMFR



Gambar 3.7. Capaian SLA Perangkat SMFR Tahun 2023

Indikator berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur dinilai dari SLA (Service Level Agreement) dari keseluruhan perangkat pendukung dan alat monitoring yang dimiliki oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dalam keadaan Baik. Dari target yang ditentukan sebesar 95% untuk nilai SLA perangkat, pada akhir tahun 2023 capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah sebesar 99,47% nilai SLA perangkat dengan kondisi Baik. Adapun selama tahun 2023 juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat monitoring yang dimiliki, yaitu :

1. Perbaikan perangkat utama Stasiun Monitoring Marusu;
2. Perbaikan perangkat utama Stasiun Monitoring Bontomarannu;
3. Pemeliharaan Stasiun Monitoring Tetap, Stasiun Monitoring *Transportable*, Stasiun Monitoring Bergerak dan Perangkat Monitoring Jinjing;
4. Perbaikan pentanahan (*grounding*) pada Stasiun Monitoring Tetap dan Stasiun Monitoring *Transportable*.

6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

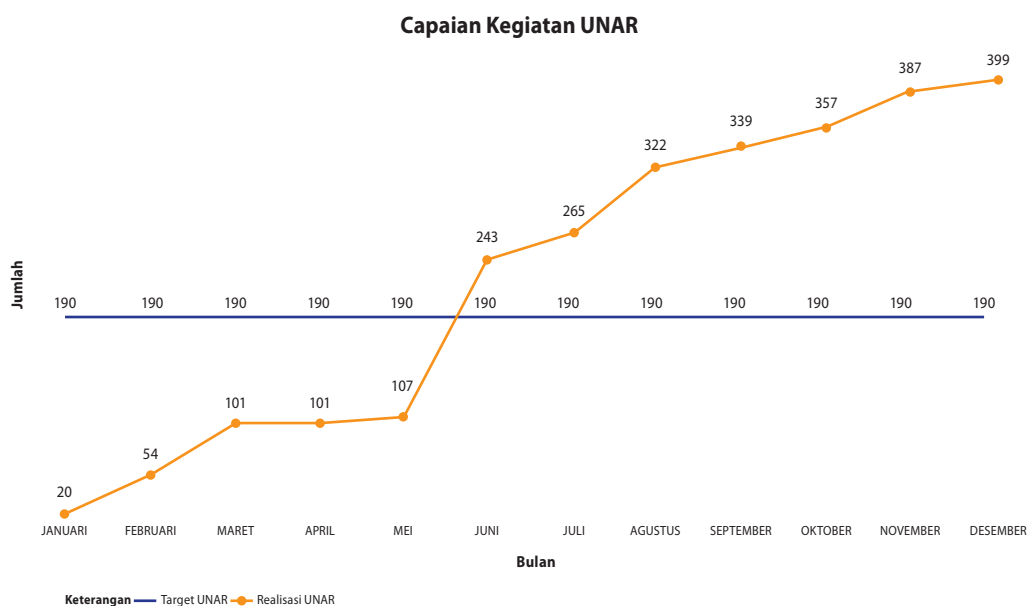
Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100%	210%	210%

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Indikator Persentase Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	2019	-	-
	2020	100	100
	2021	100	100
	2022	100	100
	2023	100	210

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT di UPT 5 Tahun Terakhir

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan ujian negara yang diselenggarakan dalam rangka menguji kompetensi para penggiat Amatir Radio untuk mendapatkan izin penggunaan frekuensi radio dalam bentuk Izin Amatir Radio (IAR) yang dibagi dalam beberapa tingkatan keahlian dari tingkat siaga, tingkat penggalang, dan tingkat penegak. Pelaksanaan UNAR dilakukan dengan dua metode kegiatan, yaitu UNAR Reguler yang dilaksanakan di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar secara rutin serta UNAR Non-Reguler yang dilaksanakan di lokasi ujian yang telah ditentukan pada Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Selatan dengan pelaksanaan ujian menggunakan sistem berbasis komputer.



Gambar 3.8. Capaian Kegiatan UNAR Tahun 2023

Selama tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali kegiatan UNAR Reguler dan 1 (satu) kali UNAR Non-Reguler di Kota Parepare. Adapun dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 jumlah peserta UNAR sebanyak 190 orang dengan capaian jumlah peserta dari 11 (sebelas) kegiatan UNAR yang dilaksanakan sebanyak 399 orang. Sehingga untuk capaian pada tahun 2023 telah memenuhi dan melebihi dari target yang ditetapkan atau sebesar 210% terpenuhi.

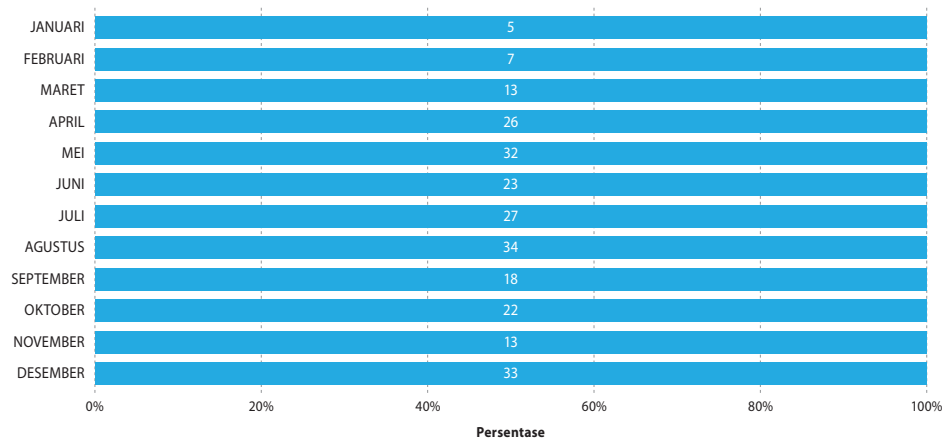
7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan KPKNL

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan KPKNL	100%	303%	303%

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Indikator Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan KPKNL Tahun 2023

Setiap penggunaan frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) yang nilainya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan program kegiatan pendampingan piutang yang terdiri dari penanganan piutang wajib bayar yang dihubungi dan pendampingan pelimpahan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk wajib bayar yang tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

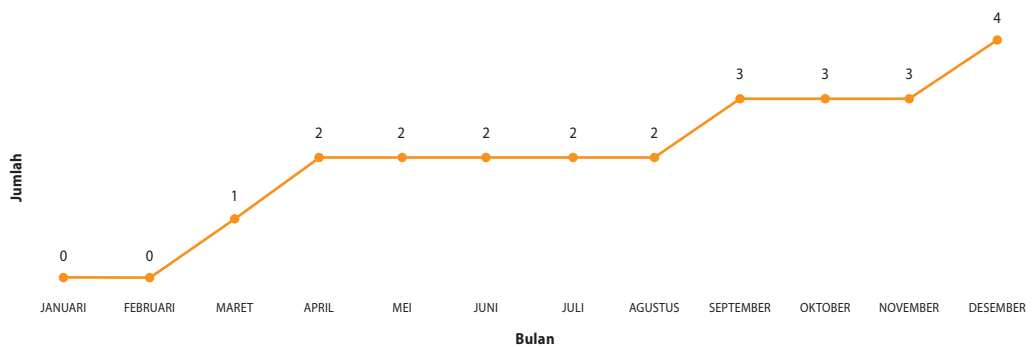
Capaian Penanganan Piutang



Gambar 3.9. Capaian Penanganan Piutang Tahun 2023

Untuk penanganan piutang yang dilaksanakan selama tahun 2023 telah dilakukan penanganan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) tagihan SPP BHP frekuensi radio yang terbit dan telah disampaikan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio dari target 50 (lima puluh). Sehingga dari target penanganan piutang sebesar 100% tagihan SPP BHP frekuensi radio yang terbit telah dilaksanakan secara keseluruhan SPP BHP yang terbit setiap bulan sehingga capaian penanganan piutang adalah sebesar 303%.

Capaian Pelimpahan KPKNL



Gambar 3.10. Capaian Pelimpahan KPKNL Tahun 2023

Sedangkan untuk kegiatan pelimpahan pada KPKNL, selama tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan koordinasi pelimpahan KPKNL pada 3 (tiga) KPKNL yang berada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, yaitu KPKNL Makassar, KPKNL Parepare dan KPKNL Palopo. Dari target koordinasi pelimpahan KPKNL sebanyak 4 (empat) kali kegiatan, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi selama tahun 2023 sesuai dengan target yang ditentukan sehingga capaian pelimpahan KPKNL sebesar 100%.

8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

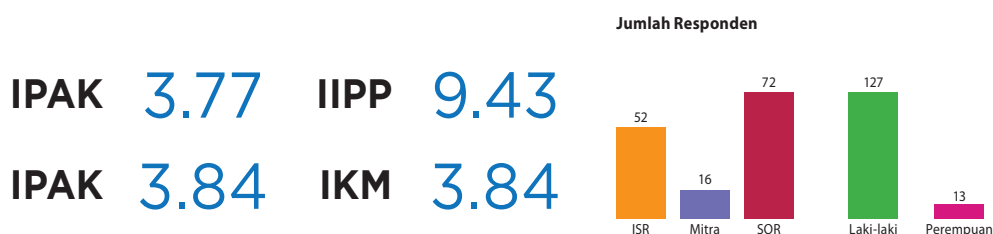
Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indikator Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Sosialisasi merupakan salah satu sarana diseminasi informasi kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio, stakeholder atau pihak terkait lainnya mengenai regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Sedangkan untuk Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integrasi Pelayanan Publik (IIPP) dilakukan menggunakan aplikasi survey yang disediakan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya dengan minimal responden yang ditargetkan sebanyak 30 orang untuk penerima layanan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.

Untuk kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik selama Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dengan fokus sosialisasi kepada pengguna Dinas Maritim dan Dinas Bergerak Darat dengan capaian peserta dari 18 Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dari target 50% Kabupaten/Kota atau 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan telah terpenuhi.

Hasil Survey Pelayanan Publik - BALMON SFR Kelas I Makassar



Gambar 3.11. Capaian Pelimpahan KPKNL Tahun 2023

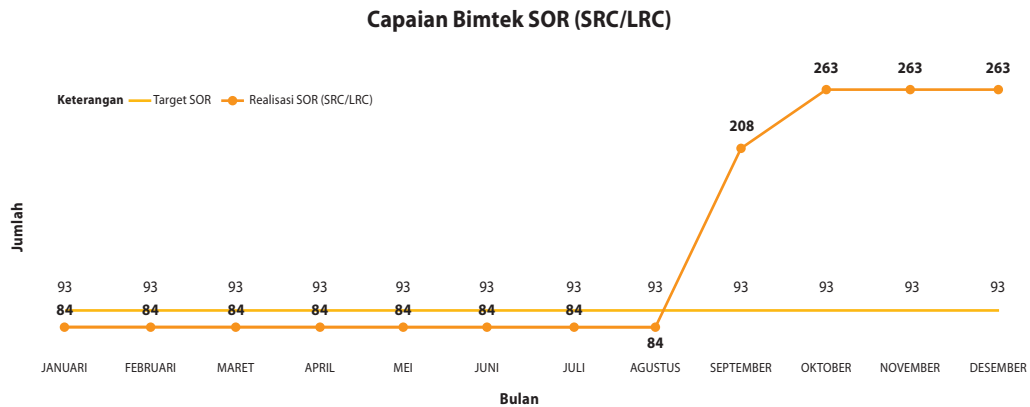
Adapun untuk capaian responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2023 telah dilaksanakan survey oleh 140 (seratus empat puluh) responden yang terdiri dari Penerima Layanan ISR, Penerima Layanan SOR dan Mitra Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Dengan hasil penilaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,84 skala 4 melebihi target 3,2 skala 4 dan hasil penilaian untuk Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) sebesar 9,43 skala 10 atau 3,77 skala 4 melebihi target 3,6 skala 4.

9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	283%	283%

Tabel 3.15. Capaian Indikator Persentase Bimbingan Teknis SRC/LRC Tahun 2023

Bimbingan Teknis SRC/LRC merupakan salah satu program pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar kepada para pengguna frekuensi radio dinas maritim khususnya kepada para Nelayan yang menggunakan komunikasi radio di laut. Pelaksanaan bimbingan teknis SRC/LRC merupakan sertifikasi kecakapan operator radio Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) non Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang mencakup sertifikasi jarak jangkauan dekat (Short Range Certification) atau SRC dan sertifikasi jarak jangkauan jauh (Long Range Certification) atau LRC.



Gambar 3.12. Capaian Bimtek SOR SRC/LRC Tahun 2023

Adapun selama tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis SOR SRC/LRC sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) peserta. Sehingga dari target yang ditentukan untuk peserta bimbingan teknis SOR SRC/LRC sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) peserta telah terpenuhi sehingga nilai capaian bimbingan teknis SOR SRC/LRC adalah sebesar 100%.

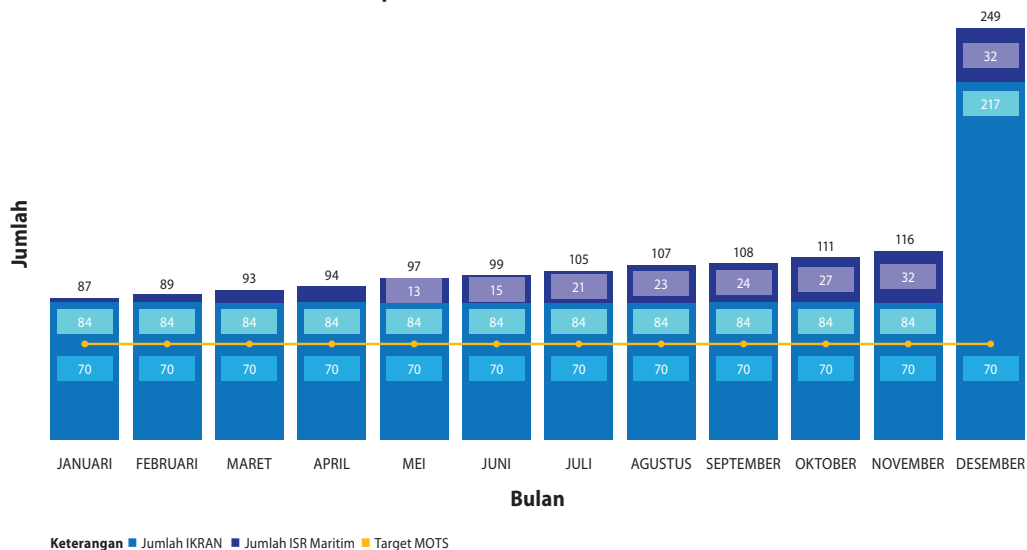
10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	356%	356%

Tabel 3.16 Capaian Indikator Persentase ISR Maritim Program MOTS-IKRAN Tahun 2023

Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim merupakan salah satu izin yang diberikan kepada pengguna kapal laut atau stasiun pantai yang digunakan untuk melakukan komunikasi pelayaran termasuk untuk komunikasi marabahaya untuk keselamatan di laut. Pelayanan pengurusan ISR Maritim termasuk dalam program MOTS yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada loket MOTS yang berlokasi di Pelabuhan Rakyat Paotere Kota Makassar. MOTS sendiri merupakan salah satu program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung ke nelayan agar terciptanya penggunaan frekuensi radio khususnya dinas maritim yang sesuai dengan peruntukan, meningkatkan kesadaran keselamatan pelayaran, dan mengurangi gangguan frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh penggunaan frekuensi yang tidak sesuai. Selain itu pemerintah telah menerbitkan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) yang menjadi salah satu alternatif penggunaan komunikasi radio yang dibutuhkan nelayan di laut dengan tujuan agar tercipta penggunaan frekuensi radio yang aman, tertib dan tidak saling mengganggu.

Capaian MOTS



Gambar 3.13. Capaian MOTS Tahun 2023

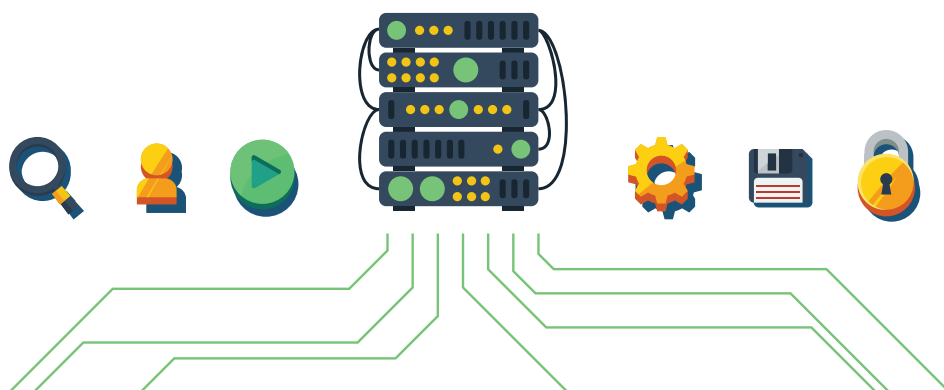
Dari program MOTS yang dilaksanakan selama tahun 2023 oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, telah terbit sebanyak 32 (tiga puluh dua) ISR Maritim dan 217 (dua ratus tujuh belas) IKRAN dengan total keseluruhan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan). Sehingga dari target yang ditentukan sebanyak 70 (tujuh puluh) ISR Maritim + IKRAN telah terpenuhi dengan nilai capaian sebesar 356%.

11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

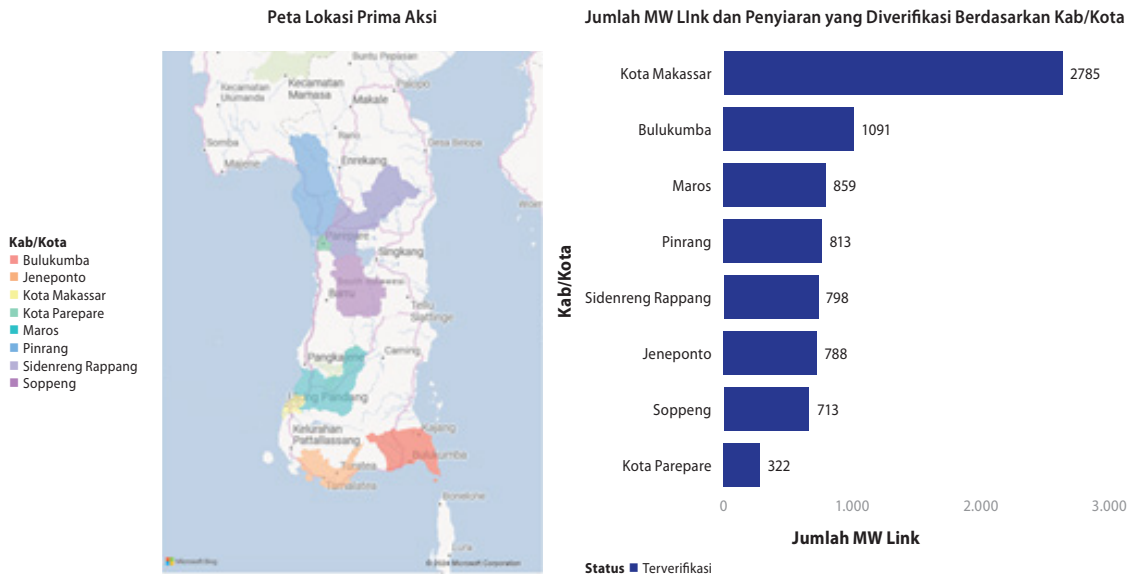
Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%

Tabel 3.17. Persentase Verifikasi Data Koordinat Siter ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

Pada Tahun 2023 Direktorat Operasi Sumber Daya meluncurkan program Prima Aksi sebagai salah satu solusi untuk permasalahan Data ISR khususnya koordinat Microwave Link dan Penyiaran yang tidak sesuai dengan koordinat di lapangan. Untuk itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melakukan verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran untuk menentukan koordinat dari suatu site Microwave Link yang sama dengan satu koordinat yang sama.



Data Hasil Kegiatan Prima Aksi Balmon Makassar



Gambar 3.14. Capaian Prima Aksi Tahun 2023

Untuk kegiatan verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah sebanyak 8.169 ISR dengan persentase 42,94% dari populasi ISR yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dari target 40% dari populasi ISR Microwave Link dan Penyiaran di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 19.117 ISR total telah memenuhi target sehingga capaian untuk verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran adalah sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA yang saat ini telah terintegrasi pada Aplikasi OM-SPAN dan digunakan oleh satker K/L diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dari sisi teknis administratif pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2023 target Nilai Kinerja Anggaran SDPPI ditetapkan sebesar 87. Nilai kinerja anggaran SDPPI diperoleh dari nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% dan nilai kinerja SMART dengan bobot sebesar 60%.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 89,19 pada akhir tahun anggaran 2023 atau sebesar 102,51% dari target yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI yaitu sebesar 87. Pembobotan IKPA berdasarkan Kementerian Keuangan antara lain kualitas pelaksanaan anggaran yang meliputi revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran yang meliputi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang meliputi capaian output.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	87	89,19	102,51%

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	2019	94	95.17
	2020	86	95.27
	2021	86	96.38
	2022	87	91.16
	2023	87	89.19

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI 5 Tahun Terakhir

Tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai nilai kinerja anggaran Ditjen SDPPI akhir sebesar 89,19 atau sebesar 102,51% diatas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan pengelolaan anggaran pada tahun 2023 dengan cukup baik, baik dari sisi perencanaan anggaran maupun efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai kinerja anggaran Ditjen SDPPI diperoleh dari perhitungan 40% capaian nilai IKPA Desember 2023 yaitu 92,72 sebesar 37,09 dan 60% capaian kinerja SMART DJA Desember 2023 yaitu 86,83 sebesar 52,09 sehingga diperoleh nilai kinerja anggaran Ditjen SDPPI sebesar 89,19.

No.	Indikator	Sub Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10,00	84,74
		Deviasi Halaman III DIPA	69,48	10	6,95	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	90,48	20	18,10	91,45
		Belanja Kontraktual	95,17	10	9,52	
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10,00	
		Pengelolaan UP dan TUP	91,58	10	9,16	
		Dispensasi SPM	80	5	4,00	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25,00	100
Nilai Total			92,72			
Konversi Bobot			100%			
Nilai Akhir			92,72			

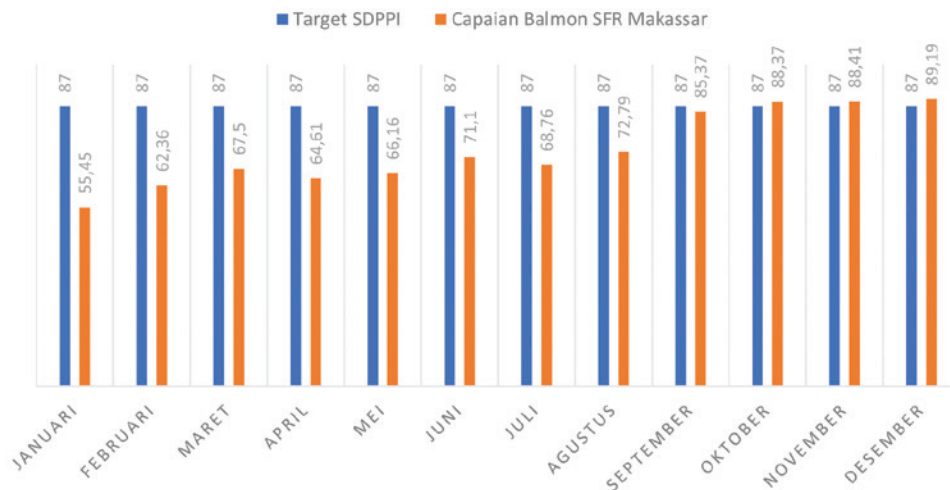
Tabel 3.20. Nilai Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

No.	Indikator	Nilai
1.	Penyerapan	99,51
2.	Konsistensi	98,74
3.	Capaian Rincian Output (CRO)	100
4.	Efisiensi	1,97
5.	Nilai Efisiensi	54,92
Nilai Akhir		86,83

Tabel 3.21. Nilai Capaian Kinerja SMART Tahun 2023

Berikut perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun Anggaran 2023 yang dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama tahun anggaran 2023 dengan target Nilai IKPA yang telah ditetapkan oleh SDPPI:

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023



Gambar 3.15. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023



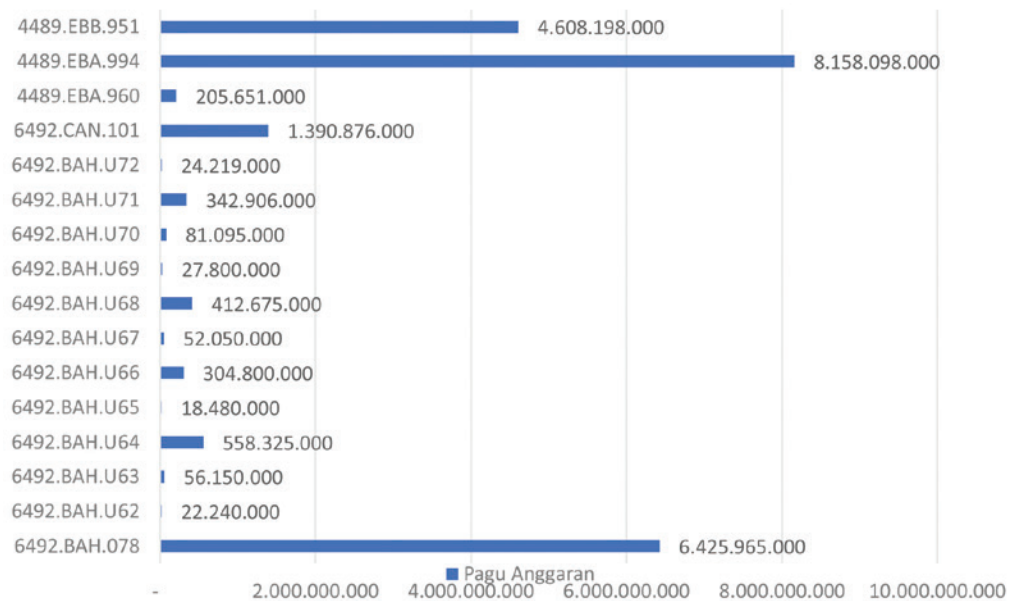
Pengelolaan Anggaran

Tahun Anggaran 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mengelola anggaran sebesar Rp. 22.689.528.000,- sesuai yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP-DIPA-059.03.2.613434/2023 tanggal 30 November 2022 yang anggarannya bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 6.734.366.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 15.955.162.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Output	Uraian	Pagu	Target Kegiatan
1.	6492.BAH.078	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	Rp. 6.425.965.000	1 Layanan
2.	6492.BAH.U62	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	Rp. 22.240.000	4 Layanan
3.	6492.BAH.U63	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Laut	Rp. 56.150.000	2 Layanan
4.	6492.BAH.U64	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	Rp. 558.352.000	25 Layanan
5.	6492.BAH.U65	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	Rp. 18.480.000	1 Layanan
6.	6492.BAH.U66	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	Rp. 304.800.000	4 Layanan
7.	6492.BAH.U67	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	Rp. 52.050.000	2 Layanan
8.	6492.BAH.U68	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	Rp. 412.675.000	20 Layanan
9.	6492.BAH.U69	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	Rp. 27.800.000,-	5 Layanan
10.	6492.BAH.U70	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Laut	Rp. 81.095.000,-	3 Layanan
11.	6492.BAH.U71	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	Rp. 342.906.000,-	19 Layanan
12.	6492.BAH.U72	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	Rp. 24.219.000,-	1 Layanan
13.	6492.CAN.101	Perangkat Monitoring UPT	Rp. 1.390.876.000	19 Unit
14.	4489.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 205.651.000,-	1 Layanan
14.	4489.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp. 8.158.098.000,-	2 Layanan
15.	4489.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp. 4.608.198.000,-	64 Unit
TOTAL PAGU			Rp. 22.689.528.000,-	

Tabel 3.22. Pagu Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2023

Komposisi Pagu Anggaran Per Komponen Tahun 2023



Gambar 3.16 Komposisi Pagu Anggaran Per Komponen Tahun 2023

Selama tahun anggaran 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melakukan 13 (tiga belas) kali revisi anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

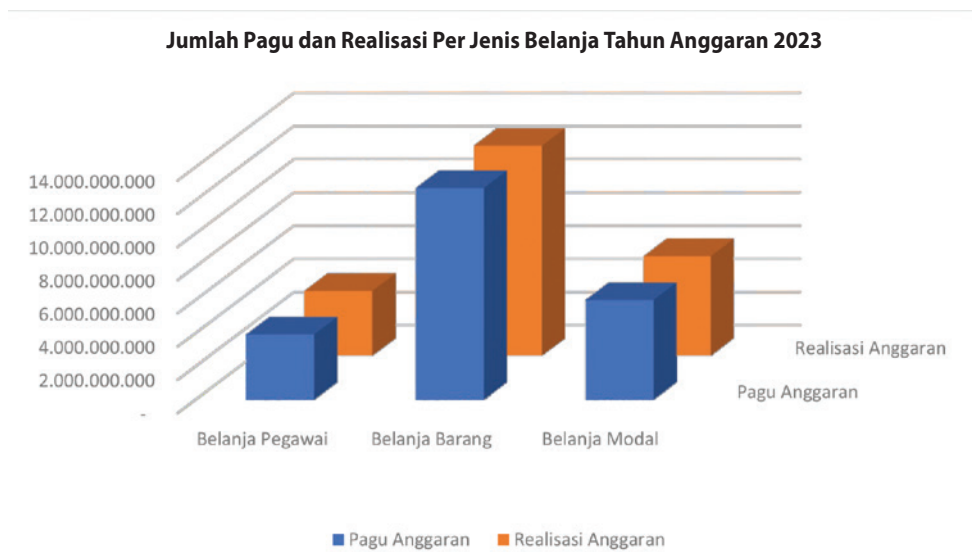
No.	Tanggal Revisi	Uraian
1.	15 Desember 2022	Revisi DJA terkait blokir <i>Automatic Adjustment</i> pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 332.832.000,- .
2.	10 April 2023	Revisi Kanwil terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi
3.	11 Juli 2023	Revisi Kanwil terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi
4.	27 Juli 2023	Revisi Kewenangan KPA terkait Penghapusan Pagu Blokir <i>Automatic Adjustment</i> pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 332.832.000,- .
5.	10 Agustus 2023	Revisi Kanwil terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi.
6.	19 Oktober 2023	Revisi DJA terkait Penambahan Pagu Anggaran
7.	20 Oktober 2023	Revisi Kewenangan KPA terkait Pergeseran Dalam Hal Pagu Tetap
8.	23 Oktober 2023	Revisi Kewenangan KPA terkait Pergeseran Dalam Hal Pagu Tetap
9.	26 Oktober 2023	Revisi Kewenangan KPA terkait Pergeseran Dalam Hal Pagu Tetap
10.	4 November 2023	Revisi Kanwil terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi.
11.	29 November 2023	Revisi Kanwil terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi.
12.	4 Desember 2023	Revisi Kewenangan KPA terkait Pergeseran Dalam Hal Pagu Tetap
13.	13 Desember 2023	Revisi Pemutakhiran Data POK Kewenangan KPA

Tabel 3.23. Revisi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 22.579.448.187,- atau sebesar 99,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 22.689.528.000,-.

Uraian	2023		Persentase (%)
	Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp. 3.924.226.000	Rp. 3.904.317.646	99,49%
Belanja Barang	Rp. 12.766.228.000	Rp. 12.677.375.627	99,30%
Belanja Modal	Rp. 5.999.074.000	Rp. 5.997.754.914	99,98%
Total	Rp. 22.689.528.000	Rp. 22.579.448.187	99,51%

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023



Gambar 3.17. Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

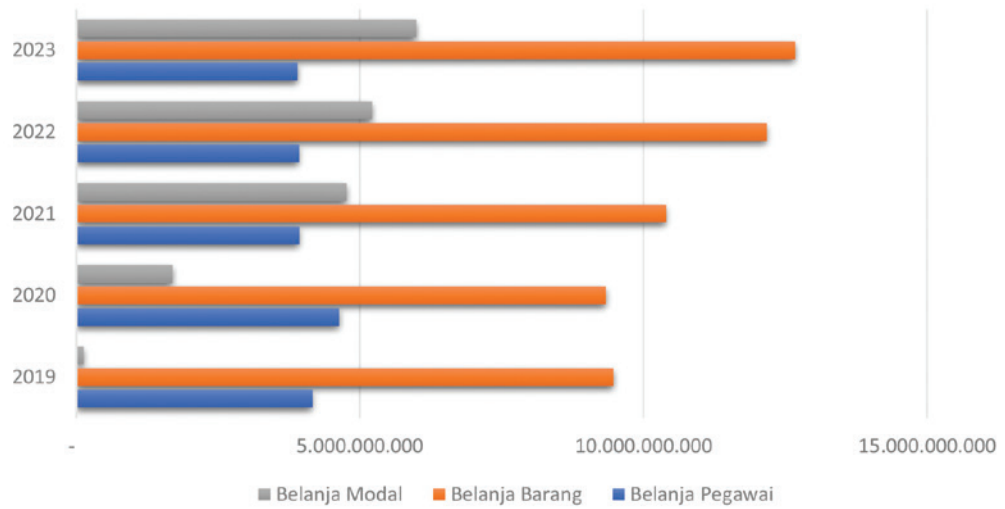
Berikut perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2019 sampai dengan 2023:

Uraian	2019		2020		2021	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 4.166.721.926	97,80	Rp. 4.640.001.955	98,97	Rp. 4.166.721.926	97,80
Belanja Barang	Rp. 9.475.163.144	98,24	Rp. 9.340.533.601	99,96	Rp. 9.475.163.144	98,24
Belanja Modal	Rp. 129.202.963	98,25	Rp. 1.697.915.500	99,95	Rp. 129.202.963	98,25
TOTAL	Rp. 13.771.088.033	98,11	Rp. 15.678.451.056	99,66	Rp. 13.771.088.033	98,11

Uraian	2022		2023	
	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp. 3.930.365.998	99,44	Belanja Pegawai	Rp. 3.930.365.998
Belanja Barang	Rp. 12.176.684.071	99,93	Belanja Barang	Rp. 12.176.684.071
Belanja Modal	Rp. 5.217.621.526	99,99	Belanja Modal	Rp. 5.217.621.526
TOTAL	Rp. 21.324.671.595	99,85	TOTAL	Rp. 21.324.671.595

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019 – 2023

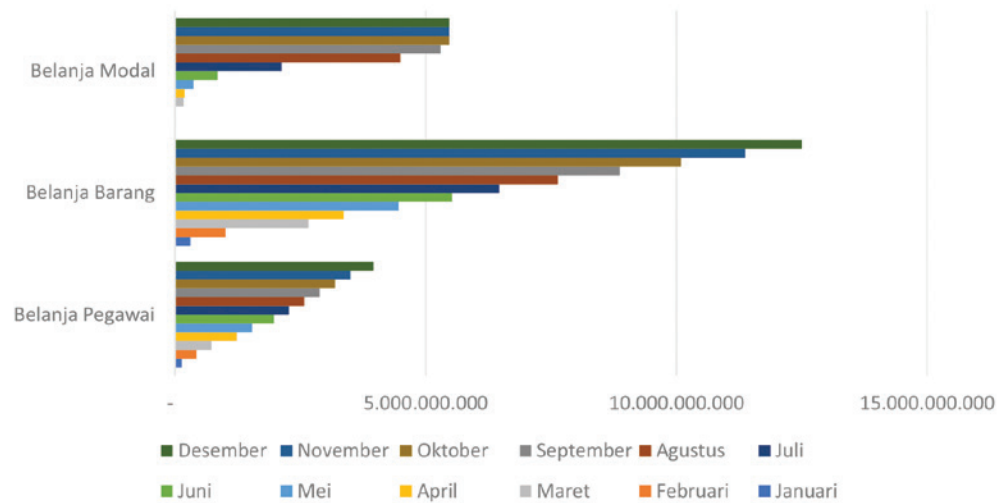
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023



Gambar 3.18. Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun 2023 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar membuat rencana penyerapan anggaran (disbursement plan) mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023. Rencana penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Disbursement Plan Tahun 2023



Gambar 3.19. Grafik Disbursement Plan Tahun 2023

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Aset

Jumlah aset pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.759.043.175,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 77.216.391, aset tetap sebesar Rp. 46.353.347.366,- dan aset lainnya sebesar Rp. 1.328.479.418,- sesuai yang tertuang dalam neraca per 31 Desember 2023.

Ada kenaikan jumlah aset pada tahun anggaran 2023 sebesar 9,09%, jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun anggaran 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 9,09%, seperti yang tertuang pada neraca per tanggal 31 Desember 2023 dibawah ini:

Nama Perkiraan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
ASET				
Aset Lancar				
Belanja Dibayar Dimuka	125.391	0	125.391	0,00
Persediaan	77.091.000	1.657.450	75.433.550	4,551.18
Jumlah Aset Lancar	77.216.391	1.657.450	(1.634.945)	4,558.75
Aset Tetap				
Tanah	21.788.333.000	21.788.333.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	39.772.227.876	43.829.713.283	4.057.485.407	10,20
Gedung dan Bangunan	13.237.229.721	10.884.951.649	2.352.278.072	21,61
Jalan, Irigasi dan Jaringan	879.006.610	879.006.610	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	14.960.000	14.960.000	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	601.254.640	0	601.254.640	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(33.997.149.888)	(29.784.858.022)	(4.212.291.866)	14,14
Jumlah Aset Tetap	46.353.347.366	43.554.621.113	2.798.726.253	6,43
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	2.812.031.528	2.049.992.370	762.039.158	37,17
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	604.800.000	0	604.800.000	0,00
Aset Lain-Lain	3.241.092.278	1.892.121.653	1.348.970.625	71,29
AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI ASET LAINNYA	(5.329.444.388)	(3.720.099.451)	(1.609.344.937)	43,26
Jumlah Aset Lainnya	1.328.479.418	222.014.572	1.106.464.846	498,37
JUMLAH ASET	47.759.043.175	43.778.293.135	3.980.750.040	9,09
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Kepada Pihak Ketiga	417.302.502	11.283.135	406.019.467	3,598.46
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	417.302.502	11.283.135	406.019.467	3,598.46
JUMLAH KEWAJIBAN	417.302.502	11.283.135	406.019.467	3,598.46
EKUITAS				
Ekuitas	47.341.740.673	43.767.010.000	3.574.730.673	8,17
JUMLAH EKUITAS	47.341.740.673	43.767.010.000	3.574.730.673	8,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	47.759.043.175	43.778.293.135	3.980.750.040	9,09

Tabel 3.26. Neraca Per 31 Desember 2023

Kegiatan Umum Lainnya

A. Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk menunjang kegiatan operasional monitoring dan perkantoran rutin, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan 35 (tiga puluh lima) kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2023, baik melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung e-purchasing maupun melalui metode tender pada LPSE.

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Metode Pemilihan
1.	Sewa Jasa Keamanan (Security), Balmon Makassar	584.400.000,-	e-Purchasing (Katalog)
2.	Sewa Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service), Balmon Makassar	331.200.000,-	e-Purchasing (Katalog)
3.	Sewa Jaringan Internet, Balmon Makassar	379.800.000,-	e-Purchasing (Katalog)
4.	Sewa Jaringan Internet Transportable, Balmon Makassar	51.960.000,-	Pengadaan Langsung
5.	Sewa Mesin Fotocopy, Balmon Makassar	65.934.000,-	Pengadaan Langsung
6.	Sewa Lahan Transportable, Balmon Makassar	141.600.000,-	Penunjukan Langsung
7.	Sewa Lokasi Penempatan Slave Marusu, Balmon Makassar	119.802.300,-	Penunjukan Langsung
8.	Sewa Lokasi Penempatan Slave Tamalate, Balmon Makassar	119.824.500,-	Penunjukan Langsung
9.	Penambah Daya Tahan Tubuh, Balmon Makassar	137.061.801,-	Pengadaan Langsung
10.	Pemeriksaan Kesehatan Medical Check-Up, Balmon Makassar	67.900.000,-	Pengadaan Langsung
11.	Peningkatan Kemampuan SDM, Balmon Makassar	111.000.000,-	Pengadaan Langsung
12.	Jasa Pendampingan ISO, Balmon Makassar	49.975.000,-	Pengadaan Langsung
13.	Sertifikasi ISO, Balmon Makassar	30.000.000,-	Pengadaan Langsung
14.	Pemeliharaan Tower Antena, Balmon Makassar	149.295.000,-	Pengadaan Langsung
15.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	1.092.676.000,-	e-Purchasing (Katalog)
16.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	192.000.000,-	e-Purchasing (Katalog)
17.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	51.200.000,-	e-Purchasing (Katalog)
18.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	74.500.000,-	e-Purchasing (Katalog)
19.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	66.000.000,-	e-Purchasing (Katalog)
20.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	55.080.000,-	e-Purchasing (Katalog)
21.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	21.600.000,-	e-Purchasing (Katalog)
22.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	9.600.000,-	e-Purchasing (Katalog)
23.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	21.600.000,-	e-Purchasing (Katalog)
24.	Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar	58.100.000,-	e-Purchasing (Katalog)
25.	Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar	125.000.000,-	e-Purchasing (Katalog)
26.	Pengadaan Kendaraan Fungsional Type I, Balmon Makassar	483.500.000,-	e-Purchasing (Katalog)
27.	Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Tower, Balmon Makassar	57.440.000,-	Pengadaan Langsung
28.	Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Fasad Bangunan Gedung, Balmon Makassar	47.363.000,-	Pengadaan Langsung
29.	Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor (Lantai dan Lantai 2), Balmon Makassar	79.920.000,-	Pengadaan Langsung
30.	Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Tower, Balmon Makassar	89.600.000,-	Pengadaan Langsung
31.	Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Fasad Bangunan Gedung, Balmon Makassar	79.032.000,-	Pengadaan Langsung

32.	Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor (Lantai dan Lantai 2), Balmon Makassar	97.862.000,-	Pengadaan Langsung
33.	Pekerjaan Pembangunan Tower, Balmon Makassar	604.800.000,-	Tender
34.	Pekerjaan Renovasi Fasad Bangunan Gedung, Balmon Makassar	873.751.000,-	Tender
35.	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor (Lantai dan Lantai 2), Balmon Makassar	1.277.553.987,-	Tender

Tabel 3.27. Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

B. Pemusnahan Barang Bukti

Balmon SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan operasi penertiban dan penanganan gangguan penggunaan frekuensi di wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Makassar. Dalam kegiatan penertiban dan penanganan gangguan tersebut diamankan alat/perangkat pemancar FM dan HT yang beroperasi tanpa izin, tidak bersertifikasi dan mengganggu pengguna frekuensi lainnya maka dibawa dan diamankan di kantor Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

Terdapat sejumlah 12 unit alat/perangkat telekomunikasi yang telah dilengkapi Berita Acara Penyerahan Alat/Perangkat Telekomunikasi dan Surat Pernyataan di atas materai dari Pemilik Alat/Perangkat tersebut untuk dimusnahkan, dan telah dilaporkan ke Direktur Pengendalian SDPPI serta dikoordinasikan dengan Korwas PPNS Polda Sulsel, Kejaksaan Negeri Gowa dan Pengadilan negeri Gowa Dengan demikian, Balmon SFR Kelas I Makassar dapat segera melaksanakan proses pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi ilegal dengan pertimbangan bahwa alat/perangkat telekomunikasi ilegal tersebut akan membebani anggaran pemeliharaan/penyimpanan setiap tahunnya, memperjelas status hukum atas alat/perangkat telekomunikasi ilegal, dan menjadi bukti kepada masyarakat terkait penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Telekomunikasi.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen No.07 tahun 2021 tentang Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Kegiatan pemusnahan barang hasil temuan kegiatan penertiban dan penanganan gangguan penggunaan frekuensi radio yang dilaksanakan adalah sebagai bentuk kepastian hukum dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan sebagai bentuk Restorative Justice kepada pengguna frekuensi radio yang setelah dilakukan proses pembinaan, alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan tidak dapat diproses untuk memiliki ISR, Sertifikasi Perangkat dan atau perangkat tersebut apabila digunakan dapat mengganggu pengguna frekuensi lainnya sehingga kegiatan pemusnahan adalah langkah terbaik guna terciptanya penggunaan frekuensi radio yang tertib dan tidak mengganggu di wilayah Sulawesi Selatan.

No.	Nama Perangkat	Nama Pemilik	No. Berita Acara
1	Ubiquity	Abdul Malik	334/BALMON.73/UM.03.08/04/2022
2	Ubiquity	Abdul Malik	334/BALMON.73/UM.03.08/04/2022
3	Rocket MS Ubiquity	Irhas Ardyansah, S.Pd.	1189/BALMON.73/UM.03.08/11/2022
4	VHF Transceiver	Ariyanto	580/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
5	Handy Talky	Arman Rizaldi	578/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
6	Radio Telephony	Akmal	579/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
7	Handy Talky	Irfan Pehiadang	577/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
8	Handy Talky	Irfan Pehiadang	577/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
9	Handy Talky	Irfan Pehiadang	577/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
10	Handy Talky	Irfan Pehiadang	577/BALMON.73/SP.03.03/06/2022

11	Transreceiver (RIG)	Irfan Pehiadang	577/BALMON.73/SP.03.03/06/2022
12	Radio MW Link	Arifuddin Rauf	10/BA SEGEL/PANTIB/XI/ BALMON.73/2021

Tabel 3.28. Tabel Daftar/Alat Perangkat Telekomunikasi yang Dimusnahkan

Sebelum dilakukan pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi ilegal dengan menggunakan alat berat (selender mini/stoom) dan dibakar, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan alat/perangkat yang akan dimusnahkan serta penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Ilegal oleh Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar yang turut ditandatangani serta disaksikan oleh Plt Kasi Korwas PPNS Polda Sulsel, Perwakilan Kejaksaan Negeri Gowa dan perwakilan pemilik alat/perangkat yang akan dimusnahkan sekaligus melakukan pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi ilegal secara simbolis dengan menggunakan martil/palu beton.

C. Kepegawaian dan Umum

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memiliki sumber daya manusia sebanyak 56 orang yang terdiri dari 29 ASN, 12 PPNPN, 6 Petugas Kebersihan, 8 Petugas Keamanan dan 1 Pengemudi.

1. Kenaikan Pangkat

Tahun 2023 telah dilakukan pengusulan kenaikan pangkat regular untuk 4 (empat) orang pegawai untuk periode Bulan April dan Bulan Oktober sesuai dengan tabel dibawah ini:

No	Nama	Pangkat Lama		Pangkat Baru		Ket
		Pangkat / Gol. Ruang	TMT	Pangkat / Gol. Ruang	TMT	
1.	Dewi Arisyanti	Penata Tk. I / III D	01 April 2016	Pembina / IV A	01 April 2023	JFT
2.	Dedy Mulyadi	Penata Tk. I / III D	01 Oktober 2019	Pembina / IV A	01 Oktober 2023	Reguler
3.	Hudaya Lira	Penata / III C	01 Oktober 2019	Penata Tk.I / III D	01 Oktober 2023	Reguler
4.	Andi Syamsul Alam	Penata / III C	01 Oktober 2019	Penata Tk.I / III D	01 Oktober 2023	Reguler

Tabel 3.29. Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023

2. Peningkatan Kemampuan SDM

Pada tahun 2023, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2023 yang diikuti 40 peserta baik ASN maupun Non ASN.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai ajang untuk mengembangkan potensi diri (capacity building), untuk memperat silaturahmi dan kekompakan serta untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai baik ASN maupun non ASN dilingkup Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

Tahun 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan berbagai jenis Pendidikan dan pelatihan serta workshop yang dapat diikuti secara daring maupun luring oleh seluruh satker di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

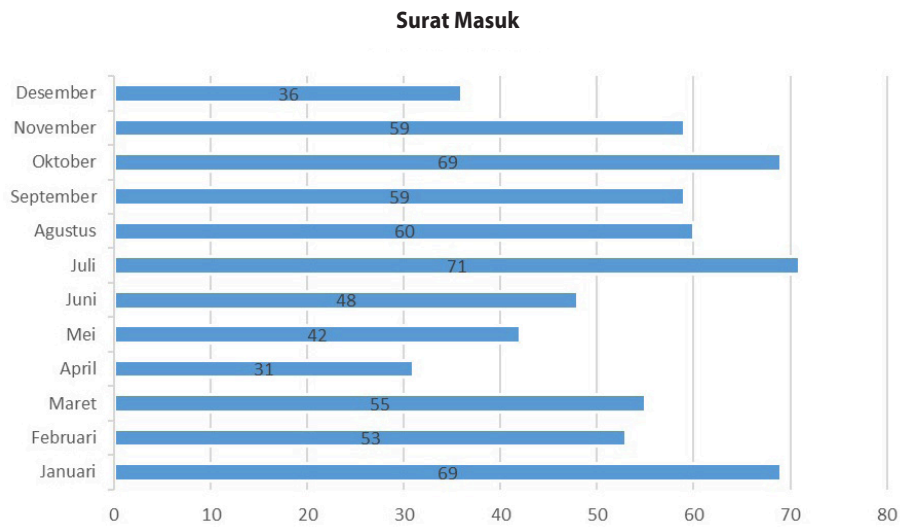
3. Pengelolaan Administrasi Persuratan

Tata persuratan adalah sistem atau proses pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Surat atau dokuen adalah produk

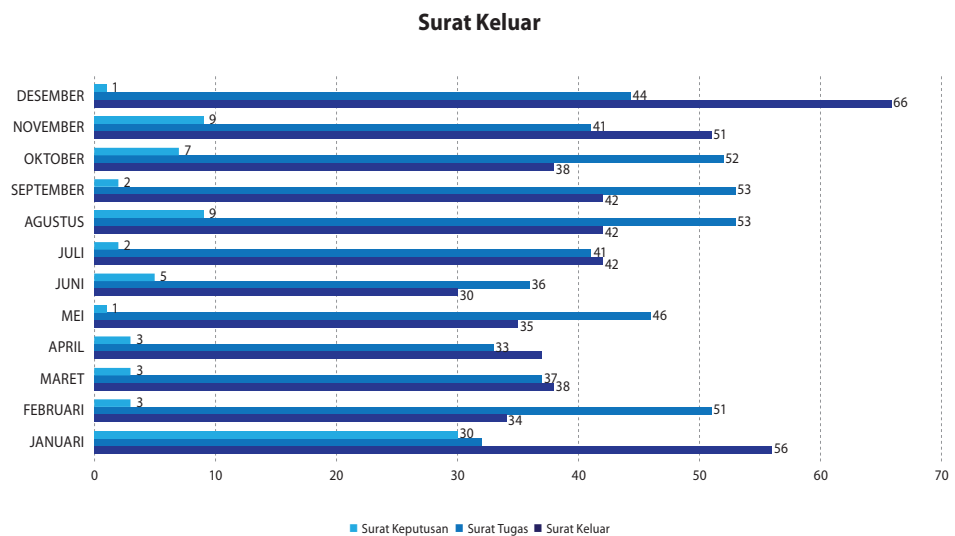
administrasi yang berupa naskah yang digunakan sebagai sarana komunikasi resmi kedinasan yang mempunyai sifat tertutup dan terbuka.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government telah mengembangkan Aplikasi Perkantoran yang diberi nama siMAYA yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan cuma-cuma. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan Tata Naskah Dinas Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 6 Tahun 2011 mengenai Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tahun 2023, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah menginventarisir sebanyak 1.755 surat masuk dan surat keluar dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.20. Grafik Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2023



Gambar 3.21. Grafik Rekapitulasi Surat Keluar Tahun 2023



Communication

Update

Signal

Synchronization

Data Hub



BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu UPT Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar senantiasa bekerja dengan mengacu pada kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung misi Ditjen SDPPI, yaitu mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.

Tahun 2023, target kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Strategis UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan telekomunikasi khususnya telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio (nirkabel) yang merupakan sumber daya terbatas milik negara yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyadari banyaknya tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar di masyarakat menuntut peningkatan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2023, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan utama dan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang menjadi penilaian dalam penetapan capaian sasaran kegiatan utama tersebut.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja pada bagian keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 22.579.448.187,- atau sebesar 99,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 212.689.528.000,-.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Laporan Kinerja ini menggunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian telah diuraikan secara deskriptif sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan masukan terhadap Laporan Kinerja ini. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.





The image features a dark grey background with a large, abstract graphic on the left side. This graphic is composed of overlapping rounded rectangular shapes in shades of orange and blue. Overlaid on these shapes are various geometric patterns and circuit-like motifs, including lines, circles, triangles, and hexagons, some in white and some in the colors of the shapes. The word "LAMPIRAN" is written in a clean, white, sans-serif font across the middle of the blue section of the graphic.

LAMPIRAN









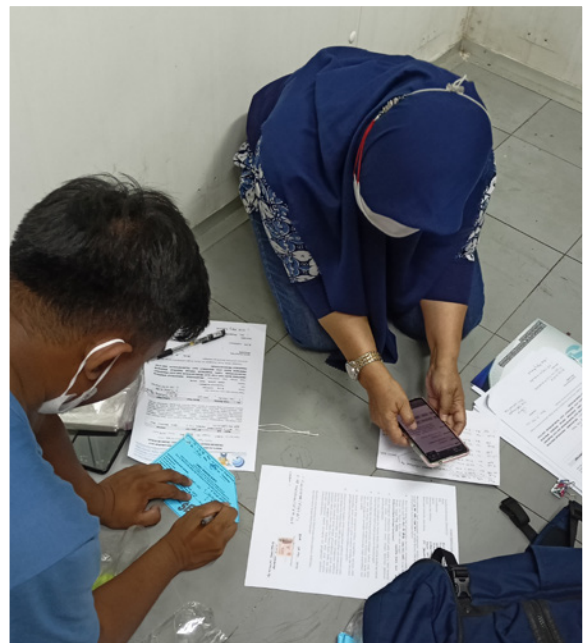


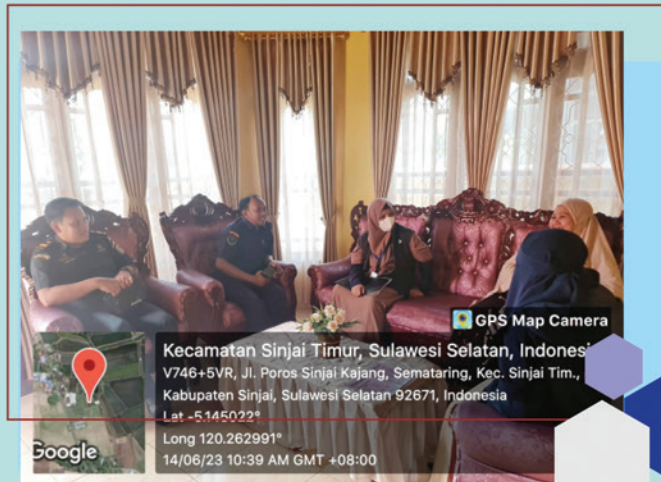








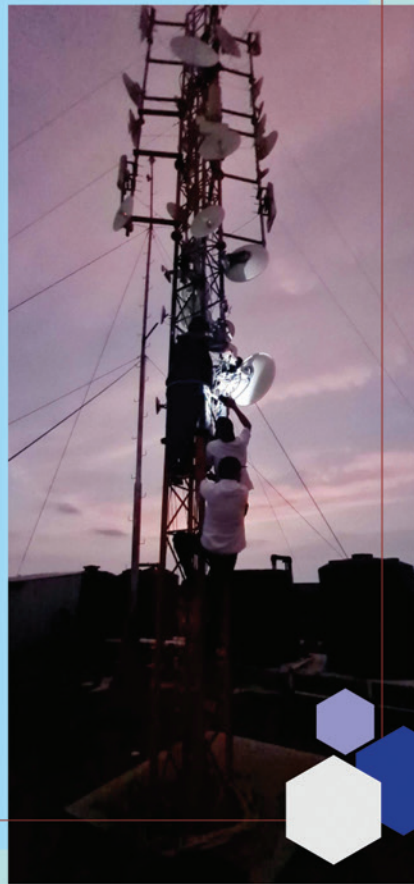














Jl. Malino No.KM 18, Borongloe, Kec. Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92172

0811-4112-323

upt_makassar@postel.co.id

balmon_makassar

balmon_makassar

@balmon.makassar

BalmonMakassar

